



Better
anyumas



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS**

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penterjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan yang selanjutnya akan menjadi RKPD/ KUA dan PPAS, serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, sesuai pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen serta perubahannya, Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
5. Program dan Kegiatan dalam Renja OPD menyesuaikan dengan Revisi atas Renstra OPD.

Visi dan misi Kabupaten Banyumas *Tahun 2024-2026 belum ada karena masih masa peralihan, sehingga masih menunggu definitif terpilih dan dilantik.*

Renja OPD mendasarkan pada isu strategis RPJMN 2020-2024, isu RPD Provinsi Jateng Tahun 2024-2026, Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025, Kebijakan dan Strategi RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 sbb :

4.2.2. Isu Strategis Dalam RPJMN Tahun 2020-2024

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, Isu strategisnya adalah :

- Keberlanjutan Sumber Daya Alam (SDA)

Ketersediaan SDA yang menjadi modal utama dalam Pembangunan makin berkurang, karena peningkatan pemanfaatan SDA sebagai sumber bahan mentah bagi kebutuhan industry dalam negeri, sekaligus juga menjadi sumber devisa.

- Efektifitas tata Kelola sumber daya ekonomi

Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan Masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam.

4.2.3. Isu RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

1. Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
2. Tata Kelola pemerintahan yang dinamis

4.2.4. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025

1. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Sejahtera
2. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Mandiri
3. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Maju Dan Berdaya Saing
4. Terwujudnya Daerah Kabupaten Banyumas Yang Lestari

4.2.5. Kebijakan dan Strategi RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031

Di bawah ini disajikan tabel kebijakan dan strategi RTRW Kab Banyumas Tahun 2011-2031 :

Tabel 1.1

Kebijakan dan Strategi RTRW Kab. Banyumas Tahun 2011-2031

No	Kebijakan	Strategi
1	Pengembangan kegiatan pertanian sebagai sektor pertumbuhan ekonomi utama kabupaten.	<ol style="list-style-type: none">a. Menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.b. Mengembangkan Kawasan pertanian.c. Mempertahankan luasan lahan pertanian pangan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.d. Mengembangkan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi sawah beririgasi teknis.e. Mengembangkan Kawasan agropolitan dan sistem agribisnis pertanian.f. Mengembangkan sektor peternakan dan perkebunan.
2	Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dan berbasis kerakyatan.	<ol style="list-style-type: none">a. Mengembangkan dan meningkatkan daya Tarik wisata.b. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata.c. Mengendalikan pengembangan lahan terbangun pada Kawasan pariwisata.

No	Kebijakan	Strategi
		d. Mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan Masyarakat.
3	Pengembangan fungsi kegiatan perdagangan dan jasa berskala local dan regional	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan fungsi Kawasan perdagangan dan jasa berskala regional, local, dan lingkungan. b. Mendorong fungsi Kawasan perdagangan dan jasa berskala nasional c. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung Kawasan perdagangan dan jasa.
4	Pengembangan Kawasan budidaya melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan Kawasan budidaya sesuai fungsinya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingsungan hidup. b. Mengendalikan dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup. c. Mengembangkan Kawasan budidaya melalui peningkatan nilai ekonomis Kawasan dan fungsi social. d. Mengembangkan sektor kehutanan dan pengolahan hasil hutan e. Mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis perikanan. f. Mengendalikan secara ketat pengelolaan lingkungan Kawasan peruntukan pertambangan. g. Mengembangkan Kawasan peruntukan industry pada jalur transportasi regional dan nasional. h. Mengembangkan dan memberdayakan industry berbasis bahan baku local dari hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan hasil tambang. i. Mengembangkan Kawasan peruntukan pemukiman terpadu.

Penyusunan Renja OPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rancangan RPD Peralihan 2024-2026, Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA / PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA)

OPD. Pada proses selanjutnya disusun Renja Tahun 2024 sebagai implementasi kebutuhan organisasi pada tahun berjalan dan untuk memenuhi program dan kegiatan yang belum ada anggarannya.

DPMPTSP Kab. Banyumas dalam melaksanakan pembangunan mendasarkan pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kab. Banyumas Tahun 2024 yang tertera pada rancangan RKPD Kab. Banyumas Tahun 2024 sbb :

Tabel 1.2
Tujuan dan Sasaran Kab. Banyumas
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran			Indikator Tujuan, Indikator Sasaran		Satuan	Target Kinerja 2024		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Berdaya Saing				1		Indeks Reformasi Berokrasi	Indeks	73,5	
	1	1.1	Mewujudkan ASN yang profesional		1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	
		2	1.2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		2	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	Indeks	4,57
		3	1.3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif		3	Nilai Komponen Hasil Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	40
					4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	79	

				5	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,1
				6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,75
Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan SDM				3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,65
	10	3.2	Meningkatkan kesempatan kerja	17	Tingkat kesempatan kerja	%	94,15
				18	Persentase daya serap tenaga kerja	%	90,68

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional berdasarkan RPJMN 2020-2024, yaitu prioritas ke 1 :

- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Mendasarkan pada pembangunan provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang diarahkan pada tema “Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan tahun 2024 yaitu prioritas 1 poin a :

- Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sector unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan

infrastruktur yang merata dan berkualitas.

- Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sector-sektor unggulan Jawa Tengah mendorong **pertumbuhan penanaman modal**, meningkatkan rasio kemandirian fiscal dan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah, serta menjaga kondusifitas wilayah.

Mendasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dan isu strategis pembangunan, maka pembangunan Banyumas Tahun 2024 diarahkan untuk Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif untuk mendukung pengembangan potensi daerah. Dengan prioritas ke 2 poin a yaitu :

- Peningkatan investasi untuk menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan dengan focus pada :
 - Implementasi pemberian insentif bagi investor;

Terkait sasaran beserta program prioritas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH (PROVINSI)	PRIORITAS DAERAH (KABUPATEN)	FOKUS PRIORITAS DAERAH (KABUPATEN)	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS/INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
PN.1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan merata berbasis sector unggulan didukung dengan	Peningkatan investasi untuk menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan	Implementasi pemberian insentif bagi investor	Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMB DAERAH (PROVINSI)	PRIORITAS PEMB DAERAH (KABUPATEN)	FOKUS PRIORITAS PEMB DAERAH (KABUPATEN)	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS/INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
	pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas					

Keselarasan antara prioritas pembangunan kab. Banyumas dengan prioritas pemb Prov Jateng dan Prioritas pemb nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Keselarasan antara Prioritas Pembangunan Kab. Banyumas dengan Prioritas Pembangunan Prov. Jateng dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

PRIORITAS NASIONAL (RPJMN)	PRIORITAS PROVINSI (RKPD PROV 2024)	PRIORITAS KABUPATEN (RKPD KAB 2024)
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sector unggulan	Peningkatan investasi untuk menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran
Memperkuat polhukam dan mereformasi publik	Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif

Renja OPD mendasarkan pada rancangan strategis dan arah kebijakan Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas rancangan RKPD Kab. Banyumas nomor 1 poin

a, b, c nomor 2 poin a dan nomor 3 poin c adalah sbb :

1. Strategi dan kebijakan prioritas peningkatan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif
 - a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN melalui menyelenggarakan dan atau memfasilitasi keikutsertaan ASN dalam diklat dan bimtek, maupun melanjutkan Pendidikan;
 - b. Meningkatkan penerapan standar pelayanan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui peningkatan kualitas tata Kelola TIK, peningkatan pemenuhan standar pelayanan, dan penerapan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
 - c. Penerapan manajemen perubahan serta penataan kelembagaan dan proses bisnis organisasi melalui peningkatan kualitas pengawasan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan peningkatan kualitas perencanaan.
2. Strategi dan arah kebijakan peningkatan investasi untuk menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan adalah :
 - a. Meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan memperbaiki iklim investasi untuk menarik investasi, pasar dan bisnis (pro growth).

Sedangkan strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan untuk mendukung upaya pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem ada pada nomor poin b :2

- b. Meningkatkan laju investasi dan kualitas pelayanan perizinan melalui pemberian insentif investasi, kemudahan perizinan, peningkatan promosi, pengendalian pelaksanaan, dan pengembangan iklim investasi, pemenuhan infrastruktur penunjang investasi, peningkatan pelayanan perijinan serta penyebarluasan informasi dan peluang investasi.
3. Strategi dan arah kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah ada pada poin c :
 - c. Optimalisasi pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam pengembangan potensi daerah melalui pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru terutama di Kawasan perdesaan, peningkatan inovasi serta promosi sector perdagangan dan industri berbahan baku local, peningkatan peran dan kapasitas

UMKM serta koperasi dalam pengembangan usaha mikro, peningkatan fasilitasi penanaman modal serta promosi investasi untuk mendorong iklim investasi yang kondusif.

Berdasarkan program, kegiatan dan Sub kegiatan tersebut diatas sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutahiran Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan / subkeg yang ada berfungsi pula mengakomodir penghapusan diskriminasi serta mendorong pelaksanaan pengarusutamaan gender, Kabupaten Layak Anak dan pelayanan disabilitas, sebagaimana tertuang pada Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Penugasan kepada para Menteri, Kepala Lembaga Non Kementrian, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Kegiatan yang mendorong **pengarusutamaan gender**, kabupaten layak anak serta disabilitas yaitu :

1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yaitu untuk pengadaan peralatan dan sarana untuk ruang laktasi , bermain anak dan disabilitas.
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Yaitu untuk sarana berupa komponen listrik/penerangan dan peralatan rumah tangga ruang laktasi , bermain anak dan disabilitas
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Yaitu untuk mendukung sarana berupa penyediaan listrik, komunikasi dan air.
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Yaitu untuk pemeliharaan sarana dan peralatan ruang laktasi, bermain anak dan disabilitas
5. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Yaitu pelayanan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan tanpa membedakan gender baik untuk pelaku usaha/investor serta masyarakat. Layanan tersebut berupa

perizinan dan non perizinan, survey kepuasan masyarakat (pengunjung), serta konsultasi dan pengaduan masyarakat.

6. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Yaitu pelayanan masyarakat terkait bimtek bagi pelaku usaha, pengawasan penanaman modal, dan penyelesaian permasalahan penanaman modal tanpa membedakan gender bagi para pelaku usaha/investor.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPN);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Daerah;
6. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
8. PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
9. PP No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. PP No 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
13. PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. PP No 41 Tahun Organisasi dan Perangkat Daerah;
15. PP No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

18. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Penugasan kepada para Menteri, Kepala Lembaga Non Kementrian, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutahiran Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
23. Peraturan Presiden No 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
29. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
30. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DPMPTSP 2024-2026.
31. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijabarkan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1.Sub Bagian Perencanaan;
 - 2.Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;
- d. Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan;
- e. Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
- f. Bidang Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- g. UPTD; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Penyusunan program dan anggaran yaitu perencanaan di tingkat OPD dilaksanakan dari Kepala, Sekretaris, para Kabid, serta Kasubag di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Kab. Banyumas.

Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang di tingkat Kabupaten, yang selanjutnya akan diterbitkan KUA /PPAS sebagai acuan dan patokan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD. Selanjutnya Rencana Program dan Anggaran ini juga dibahas dengan Badan Anggaran DPRD dan juga Komisi-komisi yang membidangi 4 urusan, berkaitan dengan DPMPTSP adalah dengan Komisi 1.

Kemudian berdasarkan KUA/PPAS terakhir dibuatlah RKA yang akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk diteliti mengenai pagu anggaran, prioritas dan kebenaran isi dari RKA dimaksud sehingga akan sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) yang ditetapkan Bupati dan tidak ada kekeliruan dalam penghitungan anggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Renja

Maksud penyusunan Renja adalah memberikan pedoman bagi program dan kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Banyumas pada Tahun 2024. Renja ini juga untuk menjabarkan tujuan sasaran dan program pembangunan Daerah yang termuat dalam dokumen RPD Kabupaten Banyumas Tahun anggaran 2024-2026.

2. Tujuan Penyusunan Renja:

Tujuan Penyusunan Renja adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam UNDANG-UNDANG dalam 25 tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;

1. Guna memberikan arah pedoman bagi DPMPTSP dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam Tahun anggaran berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Agar perencanaan lebih berkesinambungan, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan memuaskan pihak-pihak yang harus dilayani.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Untuk melihat hasil capaian pelaksanaan Renja OPD, maka dilakukan review terhadap pelaksanaan Renja pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya, berupa Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan. Sehingga hasil pelaksanaan Renja dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan pencapaiannya. Dengan evaluasi tersebut diharapkan akan menjadikan Renja tahun berikutnya (tahun n) dapat lebih baik lagi, baik dari sisi perencanaannya maupun pelaksanaannya.

Renja memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu 2022(tahun n-2) tahun berjalan 2023 (tahun n-1) serta tahun perencanaan 2024 (n). Sedangkan Penyusunan Renja Tahun 2024 sudah mengacu pada Renstra Peralihan 2024-2026, sehingga realisasi periode Renstra sebelumnya yaitu 2018-2023 dan Renstra Perubahan 2021-2023 sebagai bahan informasi saja.

Informasi yang ada dalam renja ini menyangkut Program kegiatan, indikator kinerja program, target capaian akhir periode renja, realisasi target renja akhir periode.

Dengan kajian ini diharapkan perencanaan dan pelaksanaan Renja berikutnya akan bisa maksimal dan mengenai sasaran yang akan dicapai. Dengan demikian kinerja organisasi diharapkan akan menjadi lebih efektif dan efisien sesuai fungsi organisasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya review mengenai Renja ini akan disajikan dalam tabel yang memuat informasi dan aspek-aspek yang berhubungan dengan pengukuran Renja tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta akan mengkaitkan dengan pencapaian kinerja berdasarkan target yang ada pada Renstra OPD Peralihan.

Penyajian tabel mengenai evaluasi renja OPD DPMPTSP periode sebelumnya disajikan seperti informasi di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s.d.Tahun 2022 dan s.d. TW II Tahun 2023
DPMPTSP Kabupaten Banyumas

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2023	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2022	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Permasalahan	Keterangan
						1	2						

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[TUJUAN] Meningkatnya kualitas pelayanan Penanaman Modal																						
[INDTUJUAN]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		90		87,33		90		86,25		85,88		85,875		95,42		85,875		95,42			Trw 1: Nilai IKM : 86,25 Kategori : B (Baik) Jumlah Responden 1148; Trw 2: Nilai IKM Tw I : 86,25 Nilai IKM Tw II : 85,50 Nilai IKM Tw I + Tw II / 2 = 85,875 Jumlah Responden TW I : 1148 Jumlah Responden TW II : 1417 Total Responden : 2565; Trw 3: ; Trw 4:

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[SASARAN] Menurunnya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik																						
[INDSASARAN]	Persentase penyelesaian aduan masyarakat terhadap pelayanan publik	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100			Trw 1: ; Trw 2: ; Trw 3: ; Trw 4:
[PROGRAM]PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							190,950,000		1,500,000		16,058,000		17,558,000		9,2							
[INDPROGRAM]	Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai Standar Pelayanan (SP)	%	90		100		90		97,58		99,67		99,67		110,74		99,67		110,74			Trw 1: Jumlah Penerbitan Pelayanan PM sesuai SP = 1820 Jumlah Pengajuan Pelayanan PM yg masuk = 1865 Jadi $1820/1865 \times 100\% = 97,58$; Trw 2: Jumlah Penerbitan Pelayanan PM sesuai SP = 4851 Jumlah Pengajuan Pelayanan PM yg masuk = 4867 Jadi

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp				
																							K	Rp
																							4851/4867x100% = 99,67 (Data Bulan April dan Mei, Juni belum selesai direkap); Trw 3: ; Trw 4:	
[KEGIATAN]Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							190,950,000		1,500,000		16,058,000		17,558,000		9,2									
[INDKEGIATAN]	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu	dokumen	5200				5200		11956		9676		21632		416		21632		416					Trw 1: Sebanyak 11956 SK perizinan yang diterbitkan pada Tw I; Trw 2: Sebanyak 9676 SK Perizinan yang terbit di Tw II ; Trw 3: ; Trw 4:

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[SUBKEGIATAN]2,18,04,2,01,01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							166,950,000		1,500,000		10,095,000		11,595,000		6,95							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	5250			5250		11956		4851		16807		320,13		16807		320,13				Trw 1: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dari SK Perizinan yang terbit Tw I sebanyak 11956; Trw 2: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
																						Terintegrasi Secara Elektronik, dari SK Perizinan yang terbit Tw II (Bulan April dan Mei, sedangkan Bulan Juni belum selesai direkap), sehingga total SK terbit sebanyak 4851; Trw 3: ; Trw 4:
[SUBKEGIATAN]2,18,04,2,01,02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal							14,000,000				3,335,000		3,335,000		23,82							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan	Kegiatan Usaha	24				24		9		12		21		87,5		21		87,5			Trw 1: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
	Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal																					Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal pada Tw I sejumlah 9 kegiatan; Trw 2: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal pada Tw II sejumlah 12 kegiatan; Trw 3: ; Trw 4:
[SUBKEGI ATAN]2,18,04,2,01,03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan						5,000,000				2,628,000		2,628,000		52,56							

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	200				200		47		46		93		46,5		93		46,5			Trw 1: Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan pada Tw I sejumlah 47; Trw 2: Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan pada Tw II sejumlah 46; Trw 3: ; Trw 4:
[SUBKEGIATAN]2,18,04,2,01,04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah						5,000,000															
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pealaku	Kegiatan Usaha	2				2		0		0		0		0				0			Trw 1: Belum ada Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
	Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																					Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah; Trw 2: Belum ada Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah; Trw 3: ; Trw 4:
[TUJUAN]	Meningkatnya nilai investasi daerah																					
[INDTUJUAN]	Nilai investasi daerah	Milyar Rupiah	600		1637,79		600		384,5		384,5		384,5		64,08		384,5		64,08			Trw 1: Nilai Investasi Daerah Triwulan I tahun 2023 sebesar Rp 384,513,431,620,90 ; Trw 2: Nilai Investasi Daerah Tw II belum rilis BKPM sehingga masih terisi angka Tw I sebesar Rp 384,513,431,620,90 ; Trw 3: ; Trw 4:

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[SASARAN] Meningkatnya proyek investasi daerah																						
[INDSASARAN]	Pertumbuhan proyek investasi daerah	%	1		87,42		1		36,98		36,98		36,98		36,98		36,98		36,98			Trw 1: ; Trw 2: ; Trw 3: ; Trw 4:
[PROGRAM]PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								7,888,407,982		985,140,057		2,617,891,252		3,603,031,309		45,68						
[INDPROGRAM]	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah DPMPTSP	%	100		97,01		100		15,11		44,8		44,8		44,8		44,8		44,8			Trw 1: Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah TW I sebesar 15,11 %; Trw 2: Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah TW II sebesar 44,8 %; Trw 3: ; Trw 4:

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[INDPROG RAM]	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DPMPTSP	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100			Trw 1: Terdapat 2 Dokumen Perencanaan pada Tw I yakni Draft Renstra 2024-2026 dan Draft Renja tahun 2023 target 3 dokumen yakni Renstra, Renja, dan LKJIP ; Trw 2: Terdapat 2 Dokumen Perencanaan pada Tw I yakni Draft Renstra 2024-2026 dan Draft Renja tahun 2023 target 3 dokumen yakni Renstra, Renja, dan LKJIP; Trw 3: ; Trw 4:
[INDPROG RAM]	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai DPMPTSP	%	100		100		100		25		100		100		100		100		100			Trw 1: Terdapat pengadaan barang milik daerah pada Tw I; Trw 2: Terdapat pengadaan barang milik daerah pada Tw II Sehingga jumlah barang milik daerah yang memadai sebesar 50%; Trw 3: ; Trw 4:

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[INDPROG RAM]	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah DPMPTSP	%	100		100		100		25		100		100		100		100		100			Trw 1: Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yakni ada 3 yakni Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia, Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Maka pada Tw I telah tercapai 25%; Trw 2: Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yakni ada 3 yakni Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia, Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Maka pada Tw II telah tercapai 100% Dan untuk

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp				
																							K	Rp
																							TW I seharusnya capaian 100%; Trw 3: ; Trw 4:	
[KEGIATAN]Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							8,998,500				2,150,041		2,150,041		23,89									
[INDKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	dokumen	3			3			2		1			3		100		3		100				Trw 1: Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja ada 3 yakni Renstra, Renja dan LKJIP, pada Tw I telah disusun 2 dokumen yakni Draft Renstra 2024-2026 dan Draft Renja 2023; Trw 2: Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tw I ada 1 yakni Draft Renstra 2024-2026 Telah disusun pada Tw I; Trw 3: ;

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp			
																							K
																							Trw 4:
[INDKEGIA TAN]	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	2				2		2		1		3		150		3		150				Trw 1: Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja ada 3 yakni Renstra, Renja dan LKJIP, pada Tw I telah disusun 2 dokumen yakni Draft Renstra 2024-2026 dan Draft Renja 2023; Trw 2: Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tw I ada 1 yakni Draft Renstra 2024-2026 Telah disusun pada Tw I; Trw 3: ; Trw 4:

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[INDKEGIA TAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	dokumen	3				3		2		2		2		66,67		2		66,67			Trw 1: Jumlah administrasi keuangan yang dikelola sebanyak 2 jenis, yakni penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN; Trw 2: Jumlah administrasi keuangan yang dikelola sebanyak 2 jenis, yakni penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN; Trw 3: ; Trw 4:
[INDKEGIA TAN]	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	2				2		2		2		2		100		2		100			Trw 1: Jumlah administrasi keuangan yang dikelola sebanyak 2 jenis, yakni penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN; Trw 2: Jumlah administrasi keuangan yang dikelola sebanyak 2 jenis, yakni penyediaan gaji dan

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp			
																							K
																						tunjangan ASN dan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN; Trw 3: ; Trw 4:	
[SUBKEGIATAN]X,XX,01,2,01,01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							4,999,000				1,390,041		1,390,041		27,81								
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2				2		2		0		2		100		2		100			Trw 1: Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja ada 3 yakni Renstra, Renja dan LKJIP, pada Tw I telah disusun 2 dokumen yakni Draft Renstra 2024-2026 dan Draft Renja 2023; Trw 2: Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah telah disusun pada Tw I; Trw 3: ; Trw 4:	

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp			
																							K
[SUBKEGIATAN]X,XX,01,2,01,07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							3,999,500				760		760		19								
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1				1		0		1			1		100		1		100		Trw 2 :Satuan seharusnya Dokumen Trw 2 :Satuan seharusnya Dokumen	Trw 1: LKJIP 2022; Trw 2: Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun pada Tw II; Trw 3: ; Trw 4:
[KEGIATAN]Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,920,456,432			443,516,683		1,259,805,523		1,703,322,206		58,32							
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	2				2		2		2			2		100		2		100		Trw 1: Jumlah administrasi keuangan yang dikelola sebanyak 2 jenis, yakni penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN; Trw 2: Jumlah administrasi keuangan yang dikelola sebanyak 2	

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12				12		3		3		6		50		6		50			Trw 1: Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN tersedia setiap Bulan, sehingga setiap Triwulan sejumlah 3 dokumen; Trw 2: Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN tersedia setiap Bulan, sehingga setiap Triwulan sejumlah 3 dokumen Untuk Jumlah pengelola keuangan SKPD pada Tw II sebanyak 22 Orang; Trw 3: ; Trw 4:
[KEGIATAN]Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,181,739,785			255,048,053		273,137,748		528,185,801		44,7						
[INDKEGIATAN]	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Bulan	12				12		3		3		6		50		6		50			Trw 1: Pelayanan Administrasi Umum tersedia setiap bulan, maka pada setiap Triwulan (3 Bulan); Trw 2: Pelayanan Administrasi Umum tersedia setiap bulan, maka

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp			
																							pada setiap Triwulan (3 Bulan); Trw 3: ; Trw 4:
[SUBKEGI ATAN]X,XX,01,2,06,01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						7,966,000									0							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2				2		1		1			2		100		2		100		Trw 2 :Satuan seharusnya Jenis dan target 15 Jenis Trw 2 :Satuan seharusnya Jenis dan target 15 Jenis	Trw 1: Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada Tw I sebanyak 1 paket; Trw 2: Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada Tw II sebanyak 1 paket; Trw 3: ; Trw 4:

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[SUBKEGIATAN]X,XX,01,2,06,02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							76,219,407				7,763,200		7,763,200		10,19							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5				5		5		9		9		180		9		180		Trw 2 :Satuan seharusnya Jenis Trw 2 :Satuan seharusnya Jenis	Trw 1: Terdapat 5 paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan di Tw I; Trw 2: Terdapat 4 paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan di Tw II; Trw 3: ; Trw 4:
[SUBKEGIATAN]X,XX,01,2,06,03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							13,570,178				1,695,500		1,695,500		12,49							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5				5		4		2		6		120		6		120		Trw 2 :Satuan seharusnya jenis dan target DPA 20 Trw 2 :Satuan seharusnya jenis dan	Trw 1: Sejumlah 4 Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan di Tw I; Trw 2: Sejumlah 2 Paket/Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan di Tw II; Trw 3: ; Trw 4:

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp			
																							K
																						target DPA 20	
[SUBKEGI ATAN]X,XX, 01,2,06,04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor							495,857,300				140,831,570		140,831,570		28,4								
[INDSUBK EGIATAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10				10		9		3		3		30		3		30			Trw 2 :Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada Tw II yakni 3 paket karena setiap bulannya 1 , satuan seharusnya bulan Trw 2 :Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Trw 1: Sebanyak 9 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada Tw I; Trw 2: ; Trw 3: ; Trw 4:

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	3				3		2		2		4		133,33		4		133,33		Trw 2 :Satuan seharusnya buah, sehingga realisasi 15772 Buah Dari target 15772/17000*100 = 92,77% Trw 2 :Satuan seharusnya buah, sehingga realisasi 15772 Buah Dari target 15772/17000*100 = 92,77%	Trw 1: Sejumlah 2 Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan pada Tw I; Trw 2: Sejumlah 2 Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan pada Tw II; Trw 3; ; Trw 4:
[SUBKEGIATAN]X,XX,01,2,06,09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							520,936,100			255,048,053		114,281,078		369,329,131		70,9						

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150				150		30		9		39		26		39		26		Trw 2 :Satuan seharusnya kali Trw 2 :Satuan seharusnya kali	Trw 1: Sebanyak 30 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Tw I; Trw 2: Sebanyak 9 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Tw II; Trw 3: ; Trw 4:
[KEGIATAN]Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1,398,191,000					362,696,076		362,696,076		25,94						
[INDKEGIATAN]	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	2				2		0		2		2		100		2		100		Trw 1: Belum ada penyediaan barang milik daerah pada Tw I; Trw 2: penyediaan barang milik daerah pada Tw II sebanyak 2 Jenis; Trw 3: ; Trw 4:	
[SUBKEGIATAN]X,XX,01,2,07,06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						656,491,000					302,445,276		302,445,276		46,07						

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30				30		0		32		32		106,67		32		106,67		Trw 2 :Target DPA di rubah dan disesuaikan Trw 2 :Target DPA di rubah dan disesuaikan	Trw 1: Belum ada Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Tw I; Trw 2: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada Tw II yakni 32 Unit; Trw 3: ; Trw 4:
[SUBKEGIATAN]X,XX,01,2,07,10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						741,700,000				60,250,800		60,250,800		8,12							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2				2		2		2		2		100		2		100		Trw 2 :Satuan seharusnya jenis Trw 2 :Satuan seharusnya jenis	Trw 1: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada Tw I sebanyak 2 Unit yakni Gedung MPP dan Gedung DPMPTSP; Trw 2: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp			
																							K
																							yang Disediakan pada Tw II sebanyak 2; Trw 3: ; Trw 4:
[KEGIATAN]Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,009,472,265		286,575,321		593,470,367		880,045,688		43,79								
[INDKEGIAN]	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	2				2		2		2		100		2		100						Trw 1: Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia di Triwulan IV sebanyak 2 jenis, yakni Jumlah pegawai Non ASN dan jumlah langganan surat kabar, telepon internet listrik dan air yang dikelola; Trw 2: Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia di Triwulan II sebanyak 2 jenis, yakni Jumlah pegawai Non ASN dan jumlah

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp			
																							K
																							langganan surat kabar, telepon internet listrik dan air yang dikelola; Trw 3: ; Trw 4:
[SUBKEGIATAN]X,XX,01,2,08,02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							294,889,715		42,758,761		105,297,387		148,056,148		50,21								
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12				12		3		3		6		50		6		50				Trw 1: Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tersedia pada setiap Bulan sehingga sejumlah 3 setiap Triwulannya; Trw 2: Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tersedia

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp				
																							K	Rp
																							pada setiap Bulan sehingga sejumlah 3 setiap Triwulannya; Trw 3: ; Trw 4:	
[SUBKEGIATAN]X,XX,01,2,08,04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							1,714,582,550		243,816,560		488,172,980		731,989,540		42,69									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12				12		3		3		6		50		6		50				Trw 1: Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia setiap Bulan sehingga sejumlah 3 tiap Triwulannya; Trw 2: Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia setiap Bulan sehingga sejumlah 3 tiap Triwulannya; Trw 3: ; Trw 4:	

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja															
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp					
[KEGIATAN]Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							369,550,000				126,631,497		126,631,497		34,27								
[INDKEGIAN]	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	4			4		1		1		1		25		1		25				Trw 1: Terdapat pemeliharaan barang /gedung milik daerah yang dilaksanakan pada Tw I; Trw 2: Terdapat pemeliharaan barang /gedung milik daerah yang dilaksanakan pada Tw II yakni pemeliharaan gedung MPP Dan pada Tw I pemeliharaan gedung DPMPTSP; Trw 3 : Trw 4:	

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[SUBKEGIATAN]X,XX,01,2,09,02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							108,600,000				28,167,232		28,167,232		25,94							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14			14		11		18		18		128,57		18		128,57				Trw 1: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada Triwulan I sejumlah 11 Unit; Trw 2: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada Triwulan II sejumlah 7 Unit; Trw 3: ; Trw 4:

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[SUBKEGIATAN]X,XX,01,2,09,06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							109,970,000				10,539,500		10,539,500		9,58							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	150				150		28		28		28		18,67		28		18,67			Trw 1: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada Tw I sebanyak 28 Unit; Trw 2: Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara di Tw I; Trw 3: ; Trw 4:
[SUBKEGIATAN]X,XX,01,2,09,09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							64,680,000				27,627,900		27,627,900		42,71							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2				2		2		2		2		100		2		100			Trw 1: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi yakni 2 Gedung (MPP dan DPMPTSP); Trw 2: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja															
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp			
																						yang Dipelihara/Direhabilitasi yakni 1; Trw 3; ; Trw 4:	
[SUBKEGIATAN]X,XX,01,2,09,10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							86,300,000				60,296,865		60,296,865		69,87								
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3				3		2		2		2		66,67		2		66,67		Trw 2 :Satuan seharusnya jenis Trw 2 :Satuan seharusnya jenis	Trw 1: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada Tw I sebanyak 2; Trw 2: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada Tw II sebanyak 1; Trw 3:	

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp			
																							K
																							; Trw 4:
[PROGRAM]PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							44,000,000		3,500,000		14,245,000		17,745,000		40,33								
[INDPROGRAM]	Persentase pemberian fasilitasi/ insentif penanaman modal	%	80		0		80		0		0		0		0					0		Trw 2 :Belum adanya pelaku usaha yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan fasilitasi /insentif penanaman modal sesuai dengan Perbub No, 61 tahun 2022 Trw 2 :Belum adanya	Trw 1: Belum ada pemberian fasilitasi/ insentif penanaman modal kepada pelaku usaha pada Tw I; Trw 2: Belum ada pemberian fasilitasi/ insentif penanaman modal kepada pelaku usaha pada Tw II; Trw 3: ; Trw 4:

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp			
																							K
[INDKEGIATAN]	Jumlah penetapan pemberian fasilitasi / insentif PM	SK	4				4		0		0		0		0					0			Trw 1: Belum ada penetapan pemberian fasilitasi / insentif PM kepada pelaku usaha; Trw 2: Belum ada penetapan pemberian fasilitasi / insentif PM pada Trw II; Trw 3: ; Trw 4:
[SUBKEGIATAN]2,18,02,2,01,01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	0				0		0		0		0										Trw 1: Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas, terbit tahun 2022; Trw 2: Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2022

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp			
																							K
																						tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas, terbit tahun 2022; Trw 3; ; Trw 4:	
[SUBKEGIATAN]2,18,02,2,01,02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal							5,000,000									0							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan Usaha	2				2		0		0			0		0				0			Trw 1: Belum ada Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah; Trw 2: Belum ada Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp			
																							K
																							Daerah; Trw 3: ; Trw 4:
[KEGIATAN]Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota							39,000,000		3,500,000		14,245,000		17,745,000		45,5								
[INDKEGIAN] TAN]	Jumlah dokumen PM	dokumen	1				1		0		1		1		100		1		100				Trw 1: Belum ada kajian peta potensi penanaman modal pada Tw I; Trw 2: Terdapat kajian peta potensi penanaman modal pada Tw II yakni kajian potensi investasi Susu Kambing di Kecamatan Sumbang; Trw 3: ; Trw 4:

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[SUBKEGIATAN]2,18,02,2,02,01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota																						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	0				0		0		0		0									Trw 1: PERBUP Kab, Banyumas No, 20 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Banyumas Tahun 2016 - 2025, masih berlaku hingga tahun 2025; Trw 2: PERBUP Kab, Banyumas No, 20 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Banyumas Tahun 2016 - 2025, masih berlaku hingga tahun 2025; Trw 3: ; Trw 4:

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[SUBKEGIATAN]2,18,02,2,02,02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota							39,000,000		3,500,000		14,245,000		17,745,000		45,5							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	1			1		0		1		1		100		1		100				Trw 1: Belum ada kajian peta potensi penanaman modal pada Tw I; Trw 2: Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota yang tersedia yakni 1; Trw 3: ; Trw 4:
[PROGRAM]PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							20,000,000		1,190,000		5,426,000		6,616,000		33,08							
[INDPROGRAM]	Persentase peningkatan jumlah investor yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Banyumas	%	85		100		85	0		0		0		0				0			Trw 2 :LOI dihitung dengan masuknya permohonan perijinan pelaku usaha Trw 2	Trw 1: Belum ada LoI yang masuk pada Tw I; Trw 2: Belum ada LoI yang masuk pada Tw II; Trw 3: ; Trw 4:

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp			
																							K
[SUBKEGIATAN]2,18,03,2,01,02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota							20,000,000		1,190,000		5,426,000		6,616,000		33,08								
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Dokumen	1				1		0		0		0		0					0			Trw 1: Belum ada Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota pada Tw I; Trw 2: Belum ada Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota pada Tw II; Trw 3: ; Trw 4:
[PROGRAM]PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							344,300,000		8,400,000		43,790,000		52,190,000		15,16								

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha,	0				0		0		0		0								Trw 2 :Dihapus Trw 2 :Dihapus	Trw 1: Kegiatan pemantauan pelaksanaan PM sejak TW III dan TW IV tahun 2022 ditiadakan dan diganti dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan; Trw 2: Kegiatan pemantauan pelaksanaan PM sejak TW III dan TW IV tahun 2022 ditiadakan dan diganti dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan; Trw 3: ; Trw 4:
[SUBKEGIATAN]2,18,05,2,01,02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal						258,333,000		8,400,000		42,715,000		51,115,000		19,79							

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	262				262		226		101		327		124,81		327		124,81			Trw 1: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal sebanyak 226 pelaku usaha; Trw 2: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Tw II sebanyak 101 pelaku usaha, sedangkan di TW I seharusnya 50 kegiatan; Trw 3; ; Trw 4;
[SUBKEGIATAN]2,18,05,2,01,03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal							85,967,000				1,075,000		1,075,000		1,25							

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	16				16		14		0		14		87,5		14		87,5			Trw 1: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan adalah 14 pelaku usaha; Trw 2: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan di Tw II adalah 0, sedangkan di Tw I seharusnya 6 kegiatan; Trw 3: ; Trw 4:
[PROGRAM]PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							7,500,000					4,111,000		4,111,000		54,81						

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[INDPROGRAM]	Persentase penyajian data pada sistem informasi penanaman modal	%	85		100		85		100		100		100		117,65		100		117,65		Trw 2 :Target terlalu rendah harusnya 100% Trw 2 :Target terlalu rendah harusnya 100%	Trw 1: Terdapat 4 data yang tersaji pada sistem informasi penanaman modal, yakni Data Lporan SKM, Realisasi Perizinan, Realisasi Investasi dan Laporan Pengaduan Sehingga 4/4x100% = 100%; Trw 2: Terdapat 4 data yang tersaji pada sistem informasi penanaman modal, yakni Data Lporan SKM, Realisasi Perizinan, Realisasi Investasi dan Laporan Pengaduan Sehingga 4/4x100% = 100%; Trw 3: ; Trw 4:
[KEGIATAN]Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							7,500,000				4,111,000		4,111,000		54,81							

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[INDKEGIA TAN]	Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	data	2000				2000		12224		6314		18538		926,9		18538		926,9			Trw 1: Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi terdiri dari LKPM, SKM, Pengaduan dan Realisasi Perizinan pada Tw I sebanyak 12224 (Realisasi Perizinan=11956, Pengaduan=47, SKM=3, dan Realisasi Investasi=218) ; Trw 2: Meliputi data : Realisasi SK Perizinan = 4851 (Bulan April dan Mei, Bulan Juni belum selesai direkap) Rekap Pengaduan Masyarakat = 46 Nilai SKM (Responden) = 1417 Realisasi Investasi = Belum rilis BKPM Sehingga sementara jumlah dari seluruh data sebesar 6314 ; Trw 3: ; Trw 4:

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+1 1		13=12/7* 100		14=6+12		15=14/5*1 00		16	17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja															
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	R p	K	Rp					
[SUBKEGI ATAN]2,18, 06,2,01,01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							7,500,000					4,111,000		4,111 ,000		54, 81							

3	4	4A	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[INDSUBK EGIATAN]	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	20000				20000		12224		9725		21949		109,75		21949		109,75			Trw 1: Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi terdiri dari LKPM, SKM, Pengaduan dan Realisasi Perizinan pada Tw I sebanyak 12224 (Realisasi Perizinan=11956, Pengaduan=47, SKM=3, dan Realisasi Investasi=218) ; Trw 2: Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi terdiri dari LKPM, SKM, Pengaduan dan Realisasi Perizinan pada Tw II sebanyak 9725 (Realisasi Perizinan=9676, Pengaduan=46, SKM=3, dan Realisasi Investasi=belum rilis BKPM); Trw 3: ; Trw 4:

Tabel 2.2
CAPAIAN KINERJA TUJUAN TAHUN 2023 S.D. TW II

No	Aspek/Tujuan/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2022	Tahun 2023				Tingkat Capaian RKPD 2023 s.d TW II	Status Capaian 2023	Tingkat Capaian RKPD 2023 Thd RPJMD	Status Capaian 2023 Triwulan II	Identifikasi		KET	OPD
						Target 2023	Realisasi 1	Realisasi 2	Realisasi 2023 s.d. Triwulan II					Permasalahan	Rekomendasi		
MISI 1	Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik																
TUJUAN 1	Meningkatnya kualitas pelayanan Penanaman Modal																
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	NON KUMULATIF - POSITIF		90.00	87.33	90.00	86.25	85.875	85.875	95.42		95.42				Nilai IKM Tw I : 86.25 Nilai IKM Tw II : 85.50 Nilai IKM Tw I + Tw II / 2 = 85.875 Jumlah Responden TW I : 1148 Jumlah Responden TW II : 1417 Total Responden : 2565	
MISI 5	Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan																
TUJUAN 1	Meningkatnya nilai investasi daerah																
1	Nilai investasi daerah	NON KUMULATIF - POSITIF	Milyar Rupiah	600	1637.79	600	384.5	384.5	384.5	64.08		64.08				Nilai Investasi Daerah Tw II belum rilis BKPM sehingga masih terisi	

No	Aspek/Tujuan/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2022	Tahun 2023				Tingkat Capaian RKPD 2023 s.d TW II	Status Capaian 2023	Tingkat Capaian RKPD 2023 Thd RPJMD	Status Capaian 2023 Triwulan II	Identifikasi		KET	OPD
						Target 2023	Realisasi 1	Realisasi 2	Realisasi 2023 s.d. Triwulan II					Permasalahan	Rekomendasi		
																angka Tw I sebesar Rp 384.513.431.620,90	

Tabel 2.3
CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2023 S.D. TW II

No	Aspek/Sasaran/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Target	Realisasi	Tahun 2023	Tingkat Capaian	Status	Tingkat Capaian	Status	Identifikasi	KET
----	---------------------------------	---------------------	--------	--------	-----------	------------	-----------------	--------	-----------------	--------	--------------	-----

				Akhir RPJMD	Sampai Tahun 2022	Target 2023	Realisasi 1	Realisasi 2	Realisasi 2023 s.d. Triwulan II	RKPD 2023 s.d TW II	Capaian 2023	RKPD 2023 Thd RPJMD	Capaian 2023 Triwulan II	Permasalahan	Rekomendasi	
SASARAN 1	Menurunnya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik															
1.1	Persentase penyelesaian aduan masyarakat terhadap pelayanan publik	NON KUMULAT IF - POSITIF	%	100	100	100	100	100	100	100		100				Pengaduan masyarakat yang masuk TW II adalah 46 dan terselesaikan 46 (46/46*100%=100%)
SASARAN 2	Meningkatnya proyek investasi daerah															
2.1	Pertumbuhan proyek investasi daerah	NON KUMULAT IF - POSITIF	%	1	87.42	1	36.98	36.98	36.98	3698		3698				Proyek investasi daerah Tw II belum rilis BKPM sehingga angka yang tertera masih menggunakan angka Tw I

Tabel. 2.4

CAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2022 dan Tahun 2023 s.d. TW II

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai	Tahun 2023	Tingkat Capaian RKPD 2023	Status Capaian 2023	Tingkat Capaian	Status Capaian 2023
----	---------------------------------	---------------------	--------	--------------------	------------------	------------	---------------------------	---------------------	-----------------	---------------------

					Tahun 2022	Target 2023	Realisasi 1	Realisasi 2	Realisasi 2023 s.d. Triwulan II	s.d TW II		RKPD 2023 Thd RPJMD	Triwulan II
PROGRAM 1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL												
1. 1	Persentase pemberian fasilitasi/ insentif penanaman modal	NON KUMULATIF/POSITIF	%	80	0	80	0	0	0	0		0	
PROGRAM 2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL												
2. 1	Persentase peningkatan jumlah investor yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Banyumas	NON KUMULATIF/POSITIF	%	85	100	85	0	0	0	0		0	
PROGRAM 3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL												
3. 1	Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai Standar Pelayanan (SP)	NON KUMULATIF/POSITIF	%	90	100	90	97.58	99.67	99.67	110.74	●	110.74	●
PROGRAM 4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL												
4. 1	Persentase investor yang wajib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	NON KUMULATIF/POSITIF	%	90	117.71	90	72.66	72.66	72.66	80.73	▶	80.73	▶
PROGRAM 5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL												

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2022	Tahun 2023				Tingkat Capaian RPKD 2023 s.d TW II	Status Capaian 2023	Tingkat Capaian RPKD 2023 Thd RPJMD	Status Capaian 2023 Triwulan II
						Target 2023	Realisasi 1	Realisasi 2	Realisasi 2023 s.d. Triwulan II				
5.1	Persentase penyajian data pada sistem informasi penanaman modal	NON KUMULATIF/POSITIF	%	85	100	85	100	100	100	117.65	●	117.65	●
PROGRAM 6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
6.1	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah DPMPTSP	NON KUMULATIF/POSITIF	%	100	100	100	25	100	100	100	●	100	●
6.2	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DPMPTSP	NON KUMULATIF/POSITIF	%	100	100	100	100	100	100	100	●	100	●
6.3	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah DPMPTSP	NON KUMULATIF/POSITIF	%	100	97.01	100	15.11	44.8	44.8	44.8	▼	44.8	▼
6.4	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai DPMPTSP	NON KUMULATIF/POSITIF	%	100	100	100	25	100	100	100	●	100	●

Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja DPMPTSP Tahun 2023 s.d. TW II

Tabel 2.5

Capaian kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 s.d. TW II

NO	URAIAN	TAHUN 2022			KATEGORI	TAHUN 2023 TW II			KATEGORI
		JUMLAH SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) TAHUN 2021		JUMLAH SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) TAHUN 2022	
1	Tujuan Strategis	2	2	69,41%	Sangat Tinggi	2	2	79,75%	Sedang
2	Sasaran Strategis	2	2	2.706,5%		2	2	1.899%	
3	Program	6	9	76,18%	Sangat Tinggi	6	9	72,66%	Sedang
4	Kegiatan	12	12	51,98%	Sangat Tinggi	12	12	163,99%	Rendah
5	Sub Kegiatan	29	29	103.71%	Sangat Tinggi	28	28	85,50%	Sangat Tinggi

Hingga akhir tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Secara umum hasil penilaian terhadap 2 (dua) sasaran, 5 (lima) program, dan 12 (dua belas) Kegiatan 30 (tiga puluh) sub kegiatan, menunjukkan bahwa diperoleh hasil rata-rata capaian kinerja sampai akhir bulan Desember adalah capaian kinerja tujuan 199,32% (2 indikator tujuan), capaian sasaran 2.706,5 % (2 indikator sasaran), capaian kinerja program 111,49% (8 indikator program), capaian kinerja kegiatan 141,13 % (12 indikator kegiatan), capaian kinerja sub kegiatan 192,05 % (32 indikator sub kegiatan) dan Prosentase realisasi keuangan sampai dengan akhir 31 Desember 2022 adalah 97,01% dengan tingkat efisiensi sumber daya pada 2 sasaran strategis 106,57%, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas pengukuran kinerjanya termasuk dalam kelompok kriteria penilaian "Sangat tinggi".

Hingga TW II Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya. Secara umum hasil penilaian terhadap 2 (dua) tujuan, 2 (dua) sasaran, 6 (enam) program, dan 12 (dua belas) Kegiatan 28 (Dua puluh delapan) sub kegiatan, menunjukkan bahwa diperoleh hasil rata-rata capaian kinerja sampai akhir bulan Juni (TW II) adalah capaian kinerja tujuan 79,75% (2 indikator tujuan), capaian sasaran 1899% (2 indikator sasaran), capaian kinerja program 72,66% (9 indikator program), capaian kinerja kegiatan 163,99% (12 indikator kegiatan), capaian kinerja sub kegiatan 85,50% (28 indikator kegiatan) dan Prosentase realisasi keuangan sampai dengan akhir 30 Juni 2023 adalah 43,57%, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas pengukuran kinerjanya termasuk dalam kelompok kriteria penilaian **”Sangat Tinggi”** dan **“cukup tinggi”**.

Ada perbedaan signifikan Renja sejak Tahun 2019 dibandingkan dengan renja periode Renstra sebelumnya, karena merupakan tahun awal Renstra 2018-2023. Hal tersebut berkaitan target kinerja yang menitikberatkan pada hasil (outcome) yaitu pada indikator kinerja program, tujuan dan sasaran. Sehingga dalam hal ini penyajian evaluasi terhadap Renja/RKPD sebelumnya menjadi berbeda dikarenakan indikator yang berbeda dibandingkan dengan periode renstra sebelumnya. Juga adanya perubahan nomenklatur nama-nama program dan kegiatan yang telah mengalami perubahan menjadi program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang berlaku mulai Tahun 2021. Juga adanya Kepmendagri No. 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasi fikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Sedangkan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan mengalami perubahan setelah adanya Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 yang ditetapkan pada Juli 2021.

Indikator-indikator tersebut telah direvisi dengan basis outcome (hasil). Sehingga ukuran kinerja program yang diampu oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid dan Kasubag menjadi jelas dan terukur. Meskipun pada dasarnya indikator program ini belum sinkron dengan tahun-tahun sebelumnya pada periode Renstra 2013-2018 karena masih berbasis output. Revisi terhadap indikator ini diperlukan karena kebutuhan pelayanan organisasi agar mencapai tujuan OPD yang telah ditetapkan, sehingga harus didukung melalui program dan kegiatan. Perubahan ukuran kinerja ini akan sangat diperlukan pada periode Renstra berikutnya yaitu Renstra 2018-2023 dengan tahun awal Renstra adalah Tahun 2019, dengan

beberapa penyempurnaan berdasarkan regulasi dan kebutuhan organisasi. Juga adanya kajian mengenai Analisis Standar Biaya (ASB) sub kegiatan atau ASB output oleh BKAD Kab, Banyumas dengan melibatkan OPD yang merupakan ASB output, yang sedang disusun Perbupnya di bulan Agustus 2021, sehingga RKA Tahun 2023 akan mengacu perbup ini, meskipun belum semua kelompok ASB disusun, namun direncanakan akan selalu diupdate ASB sub kegiatan tersebut melalui perubahan Perbup. Diharapkan dengan ASB ini perencanaan belanja di RKA akan menjadi semakin efektif dan efisien karena telah melalui kajian oleh Tim Konsultan/Akademisi dibantu BKAD dan OPD sebagai penyedia data. ASB ini berisi penentuan unit cost tiap-tiap kelompok/jenis sub kegiatan beserta persentase tiap rekening belanja dan batas atasnya.

Untuk renja mulai Tahun 2022 mengacu pada Permendagri yang baru yaitu Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Permendagri tersebut mengatur nama-nama program, kegiatan dan sub kegiatan. Hal ini berbeda dengan permendagri yang lama yaitu Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang hanya terdiri dari program dan kegiatan. Dengan perubahan Permendagri ini berakibat pada perubahan atas struktur nomenklatur program dan kegiatan. Juga berdampak pada pengelompokan sub-sub kegiatan beserta indikatornya.

Renja menyajikan informasi mengenai program dan kegiatan DPMPTSP Tahun Taun 2023 dengan 6 program 12 kegiatan serta 28 sub kegiatan, pembandingan Tahun 2022 dengan usulan 6 program serta 12 kegiatan serta 30 sub kegiatan.

2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis mengenai kinerja pelayanan DPMPTSP Kab. Banyumas adalah sebagai berikut ::

a. Capaian Kinerja Tujuan

Perbandingan hasil pengukuran capaian kinerja Per sasaran strategis dari tahun 2022 dan tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.6
CAPAIAN KINERJA TUJUAN I (SATU) TAHUN
2022 DAN TAHUN 2023 TW II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2022			TAHUN 2023 TW II		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	A (89)	A (87,33)	A (98,12)	A (90)	A (85,87)	A (95,42)

Penjelasan :

TUJUAN I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal

Indikator Kinerja

➤ Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil Indeks Masyarakat tahun 2022 target Nilai A Nilai interval (89), realisasi Nilai A dengan Nilai 87,33.

Hasil IKM ini mengalami penurunan dari tahun 2021, sehingga hal ini harus dilakukan evaluasi terhadap layanan public di MPP.

➤ Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil Indeks Masyarakat tahun 2023 target Nilai A Nilai interval (90), realisasi Nilai A dengan Nilai 85,87.

Hasil IKM ini mengalami penurunan dari tahun 2022, sehingga hal ini harus dilakukan evaluasi terhadap layanan publik di MPP. Penurunan disebabkan karena pengisian survey dilakukan secara online dan masing-masing pelanggan mengisi sendiri, sehingga persepsi tdk bisa dikendalikan. Meskipun menurun nilai tersebut masih tergolong baik, meskipun tidak mencapai target yang tinggi.

Tabel. 2.7
CAPAIAN KINERJA T U J U A N II (DUA) TAHUN 2022 DAN TAHUN
2023 TW II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2022			TAHUN 2023 TW II		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah	545.000.000.000	1.637.794.413.773	545.000.000.000	545.000.000.000	384.500.000.000	64,08

Penjelasan :

TUJUAN II : Meningkatnya Nilai Investasi Daerah

Indikator Kinerja :

- Jumlah Nilai realisasi investasi

Jumlah Nilai realisasi investasi Tahun 2022 di RPJMD target Rp.545.000.000.000,- dan realisasinya Rp 384.500.000.000 atau 64,08%.

Realisasi ini sudah tercapai 64,08%, dari target RPJMD sehingga sdh cukup tinggi. Realisasi ini adalah s.d. TW I dikarenakan realisasi TW II pada saat pencatatan belum rilis. Namun demikian berdasarkan target BKPM senilai 1,27 T, maka capaian nilai investasi masih perlu diupayakan untuk tercapai. Demikian pulai terkait dengan target tujuan strategis pemda untuk pertumbuhan investasi 2% dari tahun sebelumnya senilai 1,637 T masih perlu upaya keras lagi, sehingga persentase pertumbuhan nilai investasi daerah dapat tercapai.

b. Capaian Kinerja Sasaran

Terdapat dua sasaran yang telah tercapai yaitu :

1. Menurunnya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik
2. Meningkatnya proyek investasi daerah

Tabel 2.8
CAPAIAN KINERJA SASARAN I (SATU)
TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2022			TAHUN 2023 TW II		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Menurunnya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik	Persentase penyelesaian aduan masyarakat terhadap pelayanan public	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penjelasan atas indikator sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tahun 2022

Indikator Sasaran : Persentase penyelesaian aduan masyarakat terhadap pelayanan public

RPJMD : target 100% realisasi 100% tingkat pencapaian 100%

RKPD : target 100% realisasi 100% tingkat pencapaian 100%

Diiukur dari jml aduan masyarakat yang terselesaikan dibagi jumlah aduan dikali 100%.

Pengampu : Kepala Dinas/Sekretaris (Pengendali)/Bidang Daldatin

Aduan dapat tercapai karena adanya pengendalian yang baik dari pengampu dan respon serta tindak lanjut yg selalu dilakukan, sehingga aduan dapat terselesaikan semua sesuai waktu yang ditentukan.

Tahun 2023

Indikator Sasaran : Persentase penyelesaian aduan masyarakat terhadap pelayanan public

RPJMD : target 100% realisasi 100% tingkat pencapaian 100%

RKPD : target 100% realisasi 100% tingkat pencapaian 100%

Diiukur dari jml aduan masyarakat yang terselesaikan dibagi jumlah aduan dikali 100%.

Pengampu : Kepala Dinas/Sekretaris (Pengendali)/Bidang Daldatin

Aduan dapat tercapai karena adanya pengendalian yang baik dari pengampu dan respon serta tindak lanjut yg selalu dilakukan, sehingga aduan dapat terselesaikan semua sesuai waktu yang ditentukan.

3. Meningkatnya proyek investasi daerah

Tabel 2.9
CAPAIAN KINERJA SASARAN II TAHUN
2022 DAN TAHUN 2023 TW II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2022			TAHUN 2023 TW II		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya proyek investasi daerah Tabel	Pertumbuhan proyek investasi daerah	1%	78,74%	7874%	1%	36,98%	3698%

Penjelasan :

Tahun 2022

Indikator : Pertumbuhan proyek investasi daerah

RPJMD target 1% realisasi 43,13% tingkat capaian 4.313%

RKPD target 1% realisasi 43,13% tingkat capaian 4.313%

Diukur dari penghitungan realisasi proyek investasi LKPM tahun n (1032) dikurangi realisasi proyek investasi tahun n-1 (721) dibagi realisasi proyek investasi tahun n-1 (721) dikali seratus persen (triwulan on triwulan).

Tahun 2023

Indikator : Pertumbuhan proyek investasi daerah

RPJMD target 1% realisasi NA tingkat capaian NA

RKPD target 1% realisasi NA tingkat capaian NA

Diukur dari penghitungan realisasi proyek investasi LKPM tahun n (.....) dikurangi realisasi proyek investasi tahun n-1 (.....) dibagi realisasi

proyek investasi tahun n-1 (.....) dikali seratus persen (triwulan on triwulan).

Terhadap realisasi yg terlalu tinggi dari target perlu dilakukan penghitungan ulang dan analisis terhadap realisasi proyek investasi, karena diindikasikan indicator ini kurang tepat karena besarnya nilai investasi tidak berbanding lurus dengan proyek investasi, hal ini disebabkan tiap proyek punya kapasitas nilai investasi yang berbeda.

Solusi/TL : dilakukan penghitungan dan analisis data proyek investasi

Pengampu : Kepala Dinas/Sekretaris/Bidang Daldatin

c. Perubahan/Tambahan kinerja Sasaran kepala OPD

Tabel 2.10
CAPAIAN KINERJA SASARAN III TAHUN
2022 DAN TAHUN 2023 TW II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2021			TAHUN 2022 TW II		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Menurunnya pengaduan masyarakat yang berulang	Pengaduan Masyarakat Berulang	0%	0%	0%	0%	NA	NA

Penjelasan :

Tahun 2022

- Indikator : Pengaduan Masyarakat Berulang

RPJMD :Target 0% Realisasi 0% Tingkat Capaian 0%

RKPD : Target 0% Realisasi 0% Tingkat Capaian 0%

Terdapat 71 aduan berupa keluhan pada tahun 2022 yang kesemuanya tidak berulang.

Tidak berulang ini dengan kriteria dengan obyek yang sama, pengadu yang sama, substansi yang sama.

Tahun 2023 s.d. TW II

- Indikator : Pengaduan Masyarakat Berulang

RPJMD :Target 0% Realisasi NA Tingkat Capaian NA

RKPD : Target 0% Realisasi NA Tingkat Capaian NA

Aduan berulang belum tercatat, karena belum ada pengolahan data yg disajikan dari bidang pengampu.

Tidak berulang ini dengan kriteria dengan obyek yang sama, pengadu yang sama, substansi yang sama.

Tabel 2.11
CAPAIAN KINERJA SASARAN IV TAHUN 2022
DAN TAHUN 2023 TW II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Pengaduan yang terselesaikan sesuai yang diperjanjikan	100%	100%	100%	100%	NA	NA

Penjelasan :

Tahun 2022

- Indikator : Pengaduan yang terselesaikan sesuai yang diperjanjikan

RPJMD :Target 100% realisasi 100% tingkat capaian 100%

RKPD :Target 100% realisasi 100% tingkat capaian 100%

Pengaduan (keluhan) dapat terselesaikan dengan kurun waktu kurang dari 10 hari atau melebihi 10 hari. Untuk yang melebihi waktu 10 hari dilakukan perjanjian waktu penyelesaiannya. Untuk Tahun 2022 dengan jumlah 71 aduan keluhan waktu penyelesaian kesemuanya di bawah 10 hari.

Tahun 2023 TW II

- Indikator : Pengaduan yang terselesaikan sesuai yang diperjanjikan

RPJMD :Target 100% realisasi NA tingkat capaian NA

RKPD :Target 100% realisasi NA tingkat capaian NA Pengaduan (keluhan) dapat terselesaikan dengan kurun waktu kurang dari 10 hari

atau melebihi 10 hari. Untuk yang melebihi waktu 10 hari dilakukan perjanjian waktu penyelesaiannya. Untuk Tahun 2023 S.D.TW II jumlah aduan berupa keluhan dg penyelesaian sesuai waktu belum diketahui, karena belum ada pengolahan data dari bidang pengampu yg disajikan.

Tabel 2.12
CAPAIAN KINERJA SASARAN V TAHUN 2022
DAN TAHUN 2023 TW II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2022			TAHUN 2023 TW II		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kegiatan usaha yang berizin	Persentase usaha yang berizin	100%	30,81%	308%	100%	NA	NA

Penjelasan :

Tahun 2022

- Indikator : Persentase usaha yang berizin

RPJMD :Target 20% realisasi 30,81% tingkat capaian 154%

RKPD :Target 100% realisasi 30,81% tingkat capaian 308%

Diukur dari realisasi kegiatan usaha berijin sejumlah 26.762 keg usaha dibagi jumlah kegiatan usaha sejumlah 86.875 keg usaha dikali seratus persen. Tiap tahun diproyeksikan ada 10 % kegiatan usaha tiap tahun memperoleh perizinan, sehingga dalam 2 tahun yaitu 2022 – 2023 diproyeksikan 20% dari 86.875 keg usaha memperoleh perizinan.

Tahun 2023 s.d. TW II

- Indikator : Persentase usaha yang berizin

RPJMD :Target 20% realisasi NA tingkat capaian NA

RKPD :Target 100% realisasi NA tingkat capaian NA

Diukur dari realisasi kegiatan usaha berijin dibagi jumlah kegiatan usaha sejumlah 86.875 keg usaha dikali seratus persen. Tiap tahun diproyeksikan ada 10 % kegiatan usaha tiap tahun memperoleh perizinan, sehingga dalam 2 tahun yaitu 2022 – 2023 diproyeksikan 20% dari

86.875 keg usaha memperoleh perizinan. Untuk tahun 2023 s.d. TW II belum bisa disajikan karena data belum diolah.

Program :

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Program Pelayanan Penanaman Modal
Tahun 2022 dan Tahun 2023 TW II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2022			TAHUN 2023 TW II		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya pelayanan penanaman modal	Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai Standar Pelayanan (SP)	100%	100%	100	90%	99,67%	110,74

Penjelasan :

Tahun 2022

Indikator :Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai Standar Pelayanan (SP)

RPJMD : target 90% realisasi 100% tingkat capaian 111,11%

RKPD : target 90% realisasi 100% tingkat capaian 111,11%

Diukur dari realisasi penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai sesuai SP dibagi penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai dikali seratus persen. Dalam hal ini kinerja telah tercapai.

Solusi / TL : mempertahankan ketercapaian kinerja pada tahun berikutnya.

Pengampu : Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian Kesra dan Sektor Pembangunan.

Tahun 2023 s.d. TW II

Indikator :Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai Standar Pelayanan (SP)

RPJMD : target 90% realisasi 100% tingkat capaian 110,74%

RKPD : target 900% realisasi 100% tingkat capaian 110,74%

Diukur dari realisasi penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai sesuai SP dibagi penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai dikali seratus persen. Dalam hal ini kinerja telah tercapai.

Pencapaian kinerja s.d. TW II Tahun 2023 masih tinggi, karena pelayanan dilakukan secara optimal, sangat sedikit yg tidak sesuai sehingga sedikit sekali pengajuan yang dikembalikan/ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sesuai SP.

Solusi / TL : mempertahankan ketercapaian kinerja pada tahun berikutnya.

Pengampu : Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian Kesra dan Sektor Pembangunan.

Tabel 2.14

Capaian Kinerja Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Tahun 2022 dan Tahun 2023 TW II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2022			TAHUN 2023 TW II		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tersedianya dokumen pengembangan	Persentase pemberian fasilitas/ insentif penanama	75%	0%	0	80%	0%	0

	iklim penanam an modal	n modal						
--	------------------------------	---------	--	--	--	--	--	--

Penjelasan :

Tahun 2022

Indikator : Persentase pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal

RPJMD : target 80% realisasi 0% tingkat capaian 0%

RKPD : target 75% realisasi 0% tingkat capaian 0%

Diukur dari jumlah kegiatan usaha yang memperoleh insentif / kemudahan berusaha dibagi target pemohon/penerima insentif/kemudahan berusaha dikali seratus persen. Dalam hal ini belum terealisasi karena Perbup terkait fasilitas/insentif dan kemudahan berusaha baru terbit pada akhir tahun 2022 yaitu pada bulan Nopember 2022, sehingga waktu untuk sosialisasi terkait pemberian insentif dan kemudahan berusaha belum dapat dilakukan.

Solusi : Segera dilakukan rapat koordinasi dengan OPD terkait

Rencana Tindak lanjut : proaktif dengan jemput bola pada tahun akhir rpjmd, sehingga dapat mencapai ataupun mendekati dari target.

Tahun 2023 s.d. TW II

Indikator : Persentase pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal

RPJMD : target 80% realisasi 0% tingkat capaian 0%

RKPD : target 80% realisasi 0% tingkat capaian 0%

Diukur dari jumlah kegiatan usaha yang memperoleh insentif / kemudahan berusaha dibagi target pemohon/penerima insentif/kemudahan berusaha dikali seratus persen. Dalam hal ini belum terealisasi karena Perbup terkait fasilitas/insentif dan kemudahan berusaha baru terbit pada akhir tahun 2022 yaitu pada bulan Nopember 2022, sehingga waktu untuk sosialisasi terkait pemberian insentif dan kemudahan berusaha belum dapat dilakukan.

Solusi /TL : Segera melakukan rapat koordinasi dengan OPD terkait dalam tim termasuk konsolidasi dengan Bidang PM Sektor Pembangunan, serta

proaktif dengan jemput bola kepada pelaku usaha sehingga ada realisasi pemberian insentif dan kemudahan berusaha.

Pengampu : Bidang PIPPM

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Program Promosi Penanaman Modal
Tahun 2022 dan Tahun 2023 TW II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2022			TAHUN 2023 TW II		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya jumlah investor yang berminat menanamkan modal	Persentase peningkatan jumlah investor yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Banyumas	80%	100%	125%	85%	0%	0

Penjelasan :

Tahun 2022

Indikator : Persentase peningkatan jumlah investor yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Banyumas

RPJMD : target 85% realisasi 100% tingkat capaian 117,65%

RKPD : target 80% realisasi 100% tingkat capaian 125%

Diukur dari realisasi LoI dengan realisasi 4 LoI dari target 4 LoI.

Solusi : aktif dalam memfasilitasi calon investor bila perlu jemput bola, sehingga keminatan investor akan meningkat dengan adanya fasilitasi / pelayanan yang maksimal.

Pengampu :PIPPM

Tahun 2023 TW II

Indikator : Persentase peningkatan jumlah investor yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Banyumas

RPJMD : target 85% realisasi 0% tingkat capaian 0%

RKPD : target 85% realisasi 0% tingkat capaian 0%

Diukur dari realisasi LoI dibagi target LoI. Dalam hal ini capaian masih nol %.

Solusi : aktif dalam memfasilitasi calon investor bila perlu jemput bola, sehingga keminatan investor akan meningkat dengan adanya fasilitasi / pelayanan yang maksimal serta melakukan rencana aksi keminatan investasi dengan tenggang sisa waktu Tahun 2023.

Pengampu : Bidang PIPPM

Tabel 2.16

Capaian Kinerja Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tahun 2022 dan Tahun 2023 TW II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2022			TAHUN 2023 TW II		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Persentase investor yang wajib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	88%	117,71 %	133,76 %	90%	72,66%	80,73

Penjelasan :

Tahun 2022

Indikator : Persentase investor yang wajib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

RPJMD : target 90% realisasi 117,71 - tingkat capaian 130,79%

RKPD : target 88% realisas 117,71- tingkat capaian 133,76%

Diukur dari realisasi Investor (wajib LKPM) yang telah melaksanakan LKPM dibagi target dari BKPM dikali seratus persen

Solusi : pencapaian sudah cukup tinggi dari target, namun perlu peningkatan lagi karena apabila diukur dari jumlah investor yang wajib LKPM, maka capaian ini masih cukup kecil. Perlu pemilahan antara investor baru yg melaksanakan LKPM dan tambahan investasi oleh investor lama. Juga memperhitungkan investasi lama yg melaksanakan laporan tanpa tambahan investasi. Juga adanya laporan triwulanan yg merupakan kewajiban investor.

Tahun 2023 TW II

Indikator : Persentase investor yang wajib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

RPJMD : target 90% realisasi 117,71%- tingkat capaian 130,79%

RKPD : target 90% realisas 72,66% tingkat capaian 80,73%

Diukur dari realisasi Investor (wajib LKPM) yang telah melaksanakan LKPM dibagi target dikali seratus persen

Solusi/TL : pencapaian sudah cukup tinggi mendekati target Renja, namun perlu peningkatan lagi karena apabila diukur dari jumlah investor yang wajib LKPM, maka capaian ini masih cukup kecil. Perlu pemilahan antara investor baru yg melaksanakan LKPM dan tambahan investasi oleh investor lama. Juga memperhitungkan investasi lama yg melaksanakan laporan tanpa tambahan investasi. Juga adanya laporan triwulanan yg merupakan kewajiban investor. Fungsi pengolahan data sangat perlu dilakukan oleh Bidang pengampu, baik secara manual ataupun melalui aplikasi. Berdasarkan analisis data LKPM dengan perizinan berusaha dapat dilakukan rencana aksi lebih lanjut.

Tabel 2.17

Capaian Kinerja Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi
Penanaman Modal

Tahun 2022 dan Tahun 2023 TW II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2022			TAHUN 2023 TW II		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya pengelolaan data informasi Penanaman Modal	Persentase penyajian data pada sistem informasi penanaman modal	80%	100%	125%	80%	100%	125%

Penjelasan :

Indikator : Persentase penyajian data pada sistem informasi penanaman modal

RPJMD : target 85% realisasi 100% tingkat capaian 117,65%

RKPD : target 85% realisasi 100% tingkat capaian 117,65%

Diukur dari realisasi penyajian data dibagi jumlah data dikali seratus persen.

Solusi /TL: perlu pengembangan penyajian data untuk mendukung peningkatan pencapaian tujuan OPD dengan melakukan koordinasi dengan bidang pengampu kebutuhan akan data ditelaah kembali untuk memenuhi kebutuhan data internal dan eksternal OPD

Pengampu : Bidang Daldatin

Tabel 2.18
 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Kabupaten/Kota
 Tahun 2022 dan Tahun 2023 TW II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2022			TAHUN 2023 TW II		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2		Daerah Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat	100%	97,01%	97,01 %	100%	44,8%	44,8
3		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4		Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penjelasan :

Tahun 2022

- A. Indikator : Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai
- RPJMD : target 100 % realisasi 100% - tingkat capaian 100%
- RKPD : target 100% realisasi 100%- tingkat capaian 100%
- Diukur dari realisasi pengadaan barang dibagi target pengadaan dikali seratus persen. Dalam hal ini telah terealisasi.
- Solusi/TL : melakukan perencanaan pengadaan pada tahun berikutnya sesuai RKBU
- Pengampu : Sekretariat
- B. Indikator : Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- RPJMD : target 100% realisasi 97,01% tingkat capaian 97,01%
- RKPD : target 100% tercapai 97.01% tingkat capaian 97.01%
- Diukur dari realisasi keuangan dibagi target keuangan dikali seratus persen/ Dalam hal ini masih sudah cukup tinggi pencapaiannya, sedangkan kinerja rata-rata sudah tercapai.
- Solusi /TL: meningkatkan pencapaian kelancaran adm keu di periode berikutnya.
- Pengampu : Sekretariat
- C. Indikator : Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- RPJMD : target 100% realisasi 100% tingkat capaian 100%
- RKPD : target 100% realisasi 100% tingkat capaian 100%
- Diukur dari Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang sesuai dibagi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dikali seratus persen. Dalam hal ini kinerja telah tercapai.
- Solusi / TL : mempertahankan ketercapaian kinerja pada tahun berikutnya serta evaluasi program-program yang belum optimal ketercapaiannya
- Pengampu : Sekretariat
- D. Indikator : Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum
- RPJMD : target 100 % realisasi 100% tingkat capaian 100%
- RKPD : target 100% realisasi 100% tingkat capaian 100%

Diukur dari realisasi administrasi umum (12 bln) dibagi jumlah administrasi umum (12 bln) dikali seratus persen. Dalam hal ini realisasi telah tercapai 100%.

Solusi/TL : melaksanakan administrasi umum dengan baik agar kegiatan penunjang ini dapat mendukung kelancaran kegiatan organisasi.

Pengampu : Sekretariat

Tahun 2023 TW II

A. Indikator : Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai

RPJMD : target 100 % realisasi 100% - tingkat capaian 100%

RKPD : target 100% realisasi 100%- tingkat capaian 100%

Diukur dari realisasi pengadaan barang dibagi target pengadaan dikali seratus persen. Dalam hal ini telah terealisasi.

Solusi : melakukan perencanaan pengadaan pada tahun berikutnya.

Pengampu : Sekretariat

B. Indikator : Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

RPJMD : target 100% realisasi 97,01% tingkat capaian 97,01%

RKPD : target 100% tercapai 44,8 % tingkat capaian 44,8%

Diukur dari realisasi keuangan dibagi target keuangan dikali seratus persen/ Dalam hal ini masih pada kondisi normal, namun demikian perlu dicermati lagi sub-sub kegiatan yang masih rendah realisasinya, sehingga keuangan dan fisik program dapat segera terealisasi sesuai jadwal.

Solusi /TL: melakukan koordinasi dalam pencapaian kelancaran adm keu pada semester berikutnya

Pengampu : Sekretariat

C. Indikator : Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

RPJMD : target 100% realisasi 100% tingkat capaian 100%

RKPD : target 100% realisasi 100% tingkat capaian 100%

Diukur dari Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang sesuai dibagi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dikali seratus persen. Dalam hal ini kinerja telah tercapai.

Solusi / TL : mempertahankan ketercapaian kinerja pada tahun berikutnya.

Pengampu : Sekretariat

D. Indikator : Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum

RPJMD : target 100 % realisasi 100% tingkat capaian 100%

RKPD : target 100% realisasi 100% tingkat capaian 100%

Diukur dari realisasi administrasi umum (12 bln) dibagi jumlah administrasi umum (12 bln) dikali seratus persen. Dalam hal ini realisasi telah tercapai 100%.

Solusi/TL : melaksanakan administrasi umum dengan baik agar kegiatan penunjang ini dapat mendukung kelancaran kegiatan organisasi.

Pengampu : Sekretariat

Kinerja program Tahun 2021 masing-masing indikator tercapai 100% atau lebih (6 indikator) 91 %-100% (2 indikator), 71 % -80 % (0 indikator), hasil pengukuran kinerja program rata-rata yaitu 111,66% sedangkan Tahun 2020 133%. Dari data capaian indikator program tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian termasuk kategori “**sangat tinggi**”.

Kinerja Tahun 2021 dengan 9 indikator kinerja program adalah 91,85%. Meskipun hasil ini masih dalam kategori sangat tinggi namun masih ada 1 indikator program yang belum tercapai yaitu jumlah sector potensi yang terdapat potensi peluang dan investasi disebabkan belum dilaksanakannya subkeg penyusunan peta potensi dan peluang usaha yg. direncanakan dapat tersusun pada TW III.

Kinerja program Tahun 2022 masing-masing indikator program tercapai 100% atau lebih (4 indikator) 91 %-100% (1 indikator), 76 % -90 % (0 indikator), 66 % -75 % (0 indikator), 51% -65 % (0 indikator), kurang dari 50% (4 indikator) hasil pengukuran kinerja program rata-rata yaitu 76,18% sedangkan Tahun 2021 111,66%. Dari data capaian indikator program tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian termasuk kategori “**Sedang**”.

Kinerja Tahun 2023 dengan 9 indikator kinerja program adalah 76,18%. masih dalam kategori sedang karena baru pada triwulan 2 dan ada dua indikator yang masih 0 yaitu Persentase pemberian fasilitasi/ insentif penanaman modal dan Persentase peningkatan jumlah investor yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Banyumas. Utk yg pertama terkait fasilitas/insentif PM masih 0% dikarenakan Perbub baru ditetapkan pada TW IV Tahun 2022 dan pada awal Tahun 2023 s.d. TW II baru dilakukan sosialisasi dan koordinasi dengan OPD terkait sedangkan untuk para pelaku usaha belum dilakukan sosialisasi Perda dan Perbub Insentif dan kemudahan berusaha. Sehingga dimungkinkan sedikit atau blm ada atau sedikit pelaku usaha yg mendapat insentif ataupun kemudahan berusaha.

Kinerja program Tahun 2023 s.d. TW II masing-masing indikator program tercapai 100% atau lebih (6 indikator) 91 %-100% (0 indikator), 76 % -90 % (0 indikator), 66 % -75 % (0 indikator), 51% -65 % (0 indikator), kurang dari 50% (3 indikator) hasil pengukuran kinerja program rata-rata yaitu 72,66% sedangkan Tahun 2022 adl 76,18 %. Dari data capaian indikator program tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian termasuk kategori “**Sedang**”.

Capaian Kinerja Tahun 2023 sd.TW II dengan 9 indikator kinerja program rata-rata adalah 72,66%. masih dalam kategori sedang karena baru pada triwulan 2 dan ada satu indikator yang masih di bawah 50 yaitu Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah DPMPSTP serta 2 kinerja yang masih 0 % yaitu Persentase

pemberian fasilitasi/ insentif penanaman modal dan Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu adalah sebagai berikut:

A. Masalah Pokok :

1. Belum Optimalnya pelayanan penanaman modal.
2. Belum optimalnya Investasi yang berkualitas dan berkelanjutan.

B. Masalah :

1. Belum optimalnya pelayanan penanaman modal.
2. Investasi yang ditawarkan masih kurang menarik minat investor.

C. Akar Masalah

1. Ketepatan waktu penerbitan perizinan berusaha dan non berusaha yang belum sesuai waktu yang ditetapkan.
2. Kegiatan Usaha yang memenuhi Kriteria belum memperoleh Insentif dan kemudahan berusaha.
3. Belum optimalnya pengendalian terhadap realisasi penanaman modal.
4. Belum optimalnya pengelolaan Data perizinan berusaha dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
5. Promosi investasi yang belum maksimal.

Sedangkan isu strategis DPMPTSP Kab. Banyumas adalah :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal
2. Peningkatan Investasi Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

DPMPTSP mempunyai 6 program dan 12 kegiatan dengan 32 sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Namun demikian akan ada perbedaan antara rancangan awal Renja OPD dikarenakan penyesuaian dengan kebutuhan lewat mekanisme pembahasan melalui mesrenbang antara Pimpinan OPD, Banggar Dewan dan TAPD Kab. Banyumas. Dengan anggaran yang terbatas tersebut maka anggaran disesuaikan kembali berdasarkan telaahan bersama Bappeda. Renja Tahun 2024 sudah pada tahap Pra RKA pada bulan Juni 2024 melalui aplikasi SIPD Kemendagri.

Review terhadap rancangan awal Renja tahun 2024 telah dilakukan, hal ini berkaitan indikator kinerja serta target indikatornya serta kebutuhan dana untuk pencapaian target kinerja dengan ketersediaan dana yang ada, sehingga diperoleh hasil bahwa penetapan pagu anggaran sementara menyesuaikan dengan anggaran keseluruhan di tingkat kabupaten serta dilakukan penyesuaian anggaran berdasarkan kemampuan daerah. Untuk mensinkronisasikan antara anggaran dengan target kinerja sangat perlu dilakukan Analisis Standar Belanja (**ASB**) kegiatan atau ASB output yg. akan menghitung unit cost 1 satuan kinerja dan range/persentase tiap-tiap rekening belanja dalam kegiatan. Indikator dan target kinerja mengacu pada program, kegiatan dan sub kegiatan yg. telah disusun bersama antara Bagian Organisasi Setda, Bappedalitbang dan OPD. Indikator kinerja berubah orientasi dari output (keluaran/pelayanan) menjadi outcome (hasil). Hal ini sesuai cascading yang telah disusun berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No. 050/5889 Tahun 2021.

Setelah dilakukan review maka dilakukan analisis bersama antara Bappeda dengan OPD DPMPTSP dalam hal pemenuhan kebutuhan anggaran terhadap pencapaian target kinerja. Sehingga pencapaian kinerja tetap dapat optimal berdasarkan dana yang ada.

Proses review ini dilakukan dengan alasan untuk menghasilkan anggaran yang akurat dan tepat sasaran, serta diharapkan akan terjadinya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Program dan Anggaran.

Dengan review ini juga diharapkan akan menghasilkan program anggaran yang akuntabel, sehingga akan memudahkan dalam pencapaian kinerja dan pelaporannya.

Dalam penyusunan Renja OPD, DPMPTSP menggunakan pola berdasarkan kebutuhan untuk penanganan masalah pelayanan perizinan dan penanaman modal. Berdasarkan kebutuhan dapat direncanakan target kinerja Program dan kegiatan dan sub kegiatan dengan pagu anggaran Renja/RKPD tahap pra RKA sebesar Rp 8.315.252.000,-.Selanjutnya akan

ditetapkan KUA PPAS oleh TAPD Pemerintah Kab. Banyumas dengan nilai berdasarkan analisis dan kemampuan daerah sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Perda APBD Tahun 2024.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan atas usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan adalah usulan masyarakat melalui musrenbang tingkat desa, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten yaitu berupa skala prioritas dari tiap tahapan musrenbang. Untuk DPMPTSP tidak ada usulan program kegiatan melalui mekanisme musrenbang dari masyarakat, tetapi masih memungkinkan dari pokir DPRD serta mengakomodir urusan OPD lain yaitu diantaranya terkait Pengarus Utama Gender, Kabupaten Layak Anak serta pelayanan untuk disabilitas. Program dan kegiatan yang mendukung hal tersebut yaitu :

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Yaitu untuk sarana berupa komponen listrik/penerangan dan peralatan rumah tangga ruang laktasi , bermain anak dan disabilitas

2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Yaitu untuk mendukung sarana berupa penyediaan Listrik, komunikasi dan air.

3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Yaitu untuk pemeliharaan sarana dan peralatan ruang laktasi, bermain anak, dan disabilitas

4. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Yaitu pelayanan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan tanpa membedakan gender baik untuk pengusaha/investor serta masyarakat. Layanan tersebut berupa perizinan dan non perizinan, survey kepuasan masyarakat (pengunjung), serta konsultasi dan pengaduan masyarakat.

5. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Yaitu pelayanan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan tanpa membedakan gender baik untuk pelaku usaha/investor serta masyarakat. Layanan tersebut berupa perizinan dan non perizinan, survey kepuasan masyarakat (pengunjung), serta konsultasi dan pengaduan masyarakat.

Renja Tahun 2024 mangakomodir kebutuhan masyarakat akan pelayanan pelayanan perizinan yang optimal dengan :

1. Terpenuhinya sarpras MPP yang bagus dan nyaman untuk pelayanan kepada pengunjung mall diantaranya tempat rest berupa coffee corner dan pemenuhan sarpras yg mumpuni diantaranya peralatan penunjang pelayanan. Sehingga anggaran dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sarpras.
2. Pelayanan perizinan keliling berupa legalisasi UMKM untuk mendapatkan NIB yg dilakukan jemput bola ke lokasi tertentu, desa, kecamatan atau organisasi lainnya. Sehingga anggaran dialokasikan untk membiayai kegiatan perizinan keliling ini.
3. Adanya dukungan dewan melalui pokir yg diarahkan untuk sosialisasi perijinan kepada masyarakat pelaku usaha.
4. Diprioritaskannya anggaran untuk promosi investasi berdasarkan rapat pembahasan dengan DPRD Kab. Banyumas. Hal ini karena tugas proyeksi investasi yang cukup tinggi pada kisaran 1 triliun rupiah keatas utk tiap tahunnya sehingga sangat dibutuhkan anggaran utk promosi yang mencukupi. Investasi yg cukup banyak dan mempunyai nilai investasi yg mencukupi akan sangat mendukung dalam upaya perluasan kesempatan kerja.

Tabel mengenai Rancangan Perubahan RKPD dan analisis kebutuhannya diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 2.19
Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024
DPMPTSP Kabupaten Banyumas

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	Rencana Awal		Analisis Kebutuhan		KET
				VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.315.252.000,00		8.706.019.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			8.315.252.000,00		8.706.019.000,00	
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.408.252.000,00		7.408.252.000,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.000.000,00		10.000.000,00	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - <i>Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja</i>	(DPMPTSP Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)	3 <i>Dokumen</i>	5.000.000,00 <i>5.000.000,00</i>	3 <i>Dokumen</i>	5.000.000,00 <i>5.000.000,00</i>	
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - <i>Dokumen Evaluasi Kinerja</i>	(DPMPTSP Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)	3 <i>Dokumen</i>	5.000.000,00 <i>5.000.000,00</i>	3 <i>Dokumen</i>	5.000.000,00 <i>5.000.000,00</i>	

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	Rencana Awal		Analisis Kebutuhan		KET
				VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.065.000.000,00		4.065.000.000,00	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - <i>Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>(DPMPTSP Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)</i>	<i>31 Orang / Bulan</i>	<i>4.000.000.000,00</i>	<i>31 Orang / Bulan</i>	<i>4.000.000.000,00</i>	
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - <i>Honor PPTK dll</i>	<i>(DPMPTSP Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)</i>	<i>12 Orang</i>	<i>65.000.000,00</i>	<i>12 Orang</i>	<i>65.000.000,00</i>	
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			848.252.000,00		848.252.000,00	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - <i>Komponen Instalasi Listrik</i>	<i>(DPMPTSP Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)</i>	<i>15 Jenis</i>	<i>8.000.000,00</i>	<i>15 Jenis</i>	<i>8.000.000,00</i>	
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			50.252.000,00		50.252.000,00	

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	Rencana Awal		Analisis Kebutuhan		KET
				VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		- Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(DPMPTSP Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)	4 Jenis	50.252.000,00	4 Jenis	50.252.000,00	
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Peralatan Rumah Tangga	(027/038/SPK/PP K-DPMPTSP/III/2023, KAB. BANYUMAS)	20 Jenis	15.000.000,00	20 Jenis	15.000.000,00	
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Bahan Logistik Kantor	(027/038/SPK/PP K-DPMPTSP/III/2023, KAB. BANYUMAS)	12 Bulan	350.000.000,00	12 Bulan	350.000.000,00	
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan - Barang Cetak dan Peggandaan	(DPMPTSP Kabupaten Banyuma, KAB. BANYUMAS)	20000 Buah	50.000.000,00	20000 Buah	50.000.000,00	
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			350.000.000,00		350.000.000,00	

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	Rencana Awal		Analisis Kebutuhan		KET
				VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		- Rapat Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas	(DPMPTSP Kabupaten Banyuma, KAB. BANYUMAS)	200 Kali	350.000.000,00	200 Kali	350.000.000,00	
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Asip Dinamis pada SKPD	(DPMPTSP Kabupaten Banyuma, KAB. BANYUMAS)	2400 Berkas	25.000.000,00 25.000.000,00	2400 Berkas	25.000.000,00 25.000.000,00	
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			184.000.000,00		184.000.000,00	
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Peralatan dan Mesin Lainnya	(DPMPTSP Kabupaten Banyuma, KAB. BANYUMAS)	20 Unit	109.000.000,00 109.000.000,00	20 Unit	109.000.000,00 109.000.000,00	
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			75.000.000,00		75.000.000,00	

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	Rencana Awal		Analisis Kebutuhan		KET
				VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		- Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(DPMPTSP Kabupaten Banyuma, KAB. BANYUMAS)	3 Unit	75.000.000,00	3 Unit	75.000.000,00	
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.965.000.000,00		1.965.000.000,00	
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(DPMPTSP Kabupaten Banyuma, KAB. BANYUMAS)	12 Bulan	250.000.000,00	12 Bulan	250.000.000,00	
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Jasa pelayanan umum kantor	(DPMPTSP Kabupaten Banyuma, KAB. BANYUMAS)	39 Orang	1.715.000.000,00	39 Orang	1.715.000.000,00	
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			336.000.000,00		336.000.000,00	
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			110.000.000,00		110.000.000,00	

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	Rencana Awal		Analisis Kebutuhan		KET
				VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		- <i>Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan</i>	<i>(DPMPTSP Kabupaten Banyuma, KAB. BANYUMAS)</i>	<i>11 Unit</i>	<i>110.000.000,00</i>	<i>11 Unit</i>	<i>110.000.000,00</i>	
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - <i>Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>	<i>(DPMPTSP Kabupaten Banyuma, KAB. BANYUMAS)</i>	<i>66 Unit</i>	100.000.000,00 <i>100.000.000,00</i>	<i>66 Unit</i>	100.000.000,00 <i>100.000.000,00</i>	
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - <i>Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	<i>(DPMPTSP Kabupaten Banyuma, KAB. BANYUMAS)</i>	<i>2 Unit</i>	76.000.000,00 <i>76.000.000,00</i>	<i>2 Unit</i>	76.000.000,00 <i>76.000.000,00</i>	
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - <i>Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	<i>(DPMPTSP Kabupaten Banyuma, KAB. BANYUMAS)</i>	<i>2 Unit</i>	50.000.000,00 <i>50.000.000,00</i>	<i>2 Unit</i>	50.000.000,00 <i>50.000.000,00</i>	

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	Rencana Awal		Analisis Kebutuhan		KET
				VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			112.500.000,00		112.500.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			7.500.000,00		7.500.000,00	
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota - kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	(Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)	2 Kegiatan Usaha	7.500.000,00	2 Kegiatan Usaha	7.500.000,00	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			105.000.000,00		105.000.000,00	
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota - Peraturan daerah perda rencana umum penanaman modal daerah kabupaten kota	(Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)	1 Dokumen	65.000.000,00	1 Dokumen	65.000.000,00	
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota - Dokumen Peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten kota	(Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)	1 Dokumen	40.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00	

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	Rencana Awal		Analisis Kebutuhan		KET
				VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			157.000.000,00		157.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			157.000.000,00		157.000.000,00	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota - <i>Laporan Kegiatan Promosi Penanaman Modal</i>	<i>(DPMPTSP Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>97.000.000,00</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>97.000.000,00</i>	
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota - <i>Peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan kabupaten kota (Naskah Perbup Strategi Promosi)</i>	<i>(DPMPTSP Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>60.000.000,00</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>60.000.000,00</i>	
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			224.500.000,00		224.500.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang			224.500.000,00		224.500.000,00	

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	Rencana Awal		Analisis Kebutuhan		KET
				VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah - <i>Kegiata usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas insentif daerah</i>	(Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)	2 Kegiatan Usaha	20.000.000,00 20.000.000,00	2 Kegiatan Usaha	20.000.000,00 20.000.000,00	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik - <i>pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik</i>	(Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)	10000 Pelaku Usaha	132.000.000,00 132.000.000,00	10000 Pelaku Usaha	132.000.000,00 132.000.000,00	
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			20.000.000,00		20.000.000,00	

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	Rencana Awal		Analisis Kebutuhan		KET
				VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		- Orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	(Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)	200 Orang	20.000.000,00	200 Orang	20.000.000,00	
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko - Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan	(Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)	24 Kegiatan Usaha	52.500.000,00	24 Kegiatan Usaha	52.500.000,00	
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			393.000.000,00		783.767.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			393.000.000,00		783.767.000,00	
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			50.000.000,00		117.564.000,00	

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	Rencana Awal		Analisis Kebutuhan		KET
				VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		- Penyelesaian masalah investasi dan pengaduan	(DPMPTSP Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)	8 Pelaku Usaha	50.000.000,00	18 Pelaku Usaha	117.564.000,00	Berdasarkan Surat dari Kementerian Investasi/BKPM No. 1053/A.3/B.1/2023 - Tentang penyampaian alokasi DAK nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun 2024
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha - Pelaku usaha dan kegiatan usaha yang memperoleh fasilitasi penyelesaian masalah pembinaan dan pengawasan	(Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)	262 Pelaku Usaha	288.000.000,00 288.000.000,00	262 Pelaku Usaha	431.074.000,00 431.074.000,00	Id
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal - kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	(Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)	19 Kegiatan Usaha	55.000.000,00 55.000.000,00	19 Kegiatan Usaha	235.129.000,00 235.129.000,00	Id

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	Rencana Awal		Analisis Kebutuhan		KET
				VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			20.000.000,00		20.000.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000,00		20.000.000,00	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik - <i>Data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah dikaji dan dimanfaatkan</i>	<i>(DPMPSTP Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>20.000.000,00</i>	
		JUMLAH			8.315.252.000,00		8.706.019.000,00	

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai bahwa secara umum analisis kebutuhan telah diakomodir melalui proses dan tahapan tentang perumusan dan penelaahan renja. Namun hasil akhir akan dipengaruhi pada proses pembahasan KUA PPAS dengan memperhatikan skala prioritas serta kemampuan keuangan daerah.

Renja awal sejumlah Rp 8.315.252.000,- telah diakomodir dalam dalam Renja/RKPD sampai tahap pra RKA di SIPD sejumlah Rp 8.315.252.000,- dengan 6 program serta 12 kegiatan 31 sub kegiatan. Serta diindikasikan adanya penambahan dari DAK Non Fisik dari Rp 393.000.000,- menjadi Rp 783.767.000,- berdasarkan surat dari Kementrian Investasi/BKPM. Sehingga total anggaran sementara renja adalah Rp 8.706.019.000,00. Serta indikasi adanya tambahan anggaran pokok utk pelayanan perizinan serta promosi investasi hasil rapat pembahasan dengan komisi 1 dan 3 DPRD Kab. Banyumas. Pagu akhir belum ditetapkan oleh TAPD sd. Disusunnya renja OPD Tahun 2024.

Kinerja Program (outcome) dan kinerja kegiatan (output) sebagaimana diatas telah ditentukan target kinerjanya yang akan mendukung kepada pencapaian target kinerja sasaran (benefit) dan tujuan (impact) OPD. Tujuan dan sasaran kinerja OPD beserta indikator kinerja dan target kinerjanya dapat dilihat sbb. :

Tabel 2.21
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	Target
					2022	2024
Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal		IKM pelayanan terpadu satu pintu	IKM pelayanan terpadu satu pintu	Nilai	87,33	90,5
	Mengoptimalkan sistem pelayanan penanaman modal	persentase perizinan terpadu satu pintu yang diterbitkan	Jumlah perizinan terpadu satu pintu yang diterbitkan dibagi Jumlah permohonan perizinan terpadu satu pintu x 100%	%	NA	96
Meningkatnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan		Nilai Investasi Daerah	Jumlah nilai Realisasi LKPM ditambah nilai realisasi investasi UMK	Milyar Rupiah	1.662,45	800
	Meningkatnya kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	Jumlah kegiatan usaha yang terealisasi investasinya dibagi jumlah kegiatan berijin dikali seratus persen	%	NA	76

Sumber: e RPD Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan	Program, Kegiatan & Subkegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan		
									Awal	2024	
									Target	Target	Rp
		a pelayanan Perizinan berusaha dan non berusaha sesuai SOP		PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase perizinan berusaha dan non berusaha yang selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan	%	progres positif	Jumlah perizinan berusaha dan non berusaha yang selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan dibagi jumlah perizinan berusaha dan non berusaha dikali seratus persen	96	96	
			21804201	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu sektor perekonomian kesra dan sektor Pembangunan	SK	akumulatif	Jumlah perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu sektor perekonomian kesra dan sektor Pembangunan	10000	10000	224,500,000
			2180420101	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Pelaku usaha	akumulatif	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis	10000	10000	132,000,000

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan	Program, Kegiatan & Subkegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan		
									Awal	2024	
									Target	Target	Rp
		nya kegiatan usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan penanaman modal		PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kegiatan Usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	%	progres positif	Jumlah Kegiatan Usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan Penanaman Modal dibagi Jumlah kegiatan usaha yang diajukan untuk memperoleh Insentif dan kemudahan Penanaman Modal dikali seratus persen	50	50	
			21802201	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemberian fasilitas insentif PM	Dokumen	akumulatif	Jumlah dokumen pemberian fasilitas / insentif PM	2	2	7,500,000
			2180220101	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif	Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas Insentif dan	Dokumen	akumulatif	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif	0	0	0

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan	Program, Kegiatan & Subkegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome) , Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan		
									Awal	2024	
									Target	Target	Rp
		nya promosi investasi		PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Calon Investor yang menerima promosi terfasilitasi penanaman modal yang membuat LoI	%	progres positif	Jumlah Calon Investor yang membuat LoI dibagi jumlah calon Investor yang menerima promosi/ terfasilitasi penanaman modal dikali seratus persen	50	50	
			21803201	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Promosi PM yang menghasilkan LoI	Laporan	akumulatif	Jumlah kegiatan promosi/fasilitasi PM yang menghasilkan LoI	5	5	157,000,000
			2180320101	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten Kota	Dokumen	akumulatif	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	60,000,000
			2180320102	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten	Dokumen	akumulatif	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	2	2	97,000,000

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan	Program, Kegiatan & Subkegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan		
									Awal	2024	
									Target	Target	Rp
				Kabupaten/Kota	Kota			Kabupaten/Kota			
		Meningkatnya pengendalian terhadap realisasi penanaman modal	21805	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi	%	progres positif	Realisasi investasi dibagi target investasi dikali seratus persen	95	95	393,000,000
			21805201	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha dan Kegiatan usaha yang memperoleh fasilitasi penyelesaian masalah pembinaan dan pengawasan	Buah	akumulatif	Jumlah Pelaku usaha dan Kegiatan usaha yang memperoleh fasilitasi penyelesaian masalah, pembinaan dan pengawasan	278	278	393,000,000
			2180520101	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan usaha	akumulatif	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8	8	50,000,000

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan	Program, Kegiatan & Subkegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan		
									Awal	2024	
									Target	Target	Rp
				Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi secara elektronik yang disajikan di website	Buah	akumulatif	Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi secara elektronik yang disajikan di website	4	4	
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	akumulatif	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4	4	20,000,000
		Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	21801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	progres positif	Rata-rata presentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	96	96	7,408,252,000

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan	Program, Kegiatan & Subkegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan		
									Awal	2024	
									Target	Target	Rp
				Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Dokumen	akumulatif	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	12	12	
			21801206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	akumulatif	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	848,252,000
			2180120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Paket	akumulatif	Jumlah pelayanan Administrasi Umum yang tersedia	15	15	8,000,000
			2180120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Paket	akumulatif	Jumlah pelayanan Administrasi Umum yang tersedia	4	4	50,252,000
			2180120603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Paket	akumulatif	Jumlah pelayanan Administrasi Umum yang tersedia	20	20	15,000,000
			2180120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Paket	akumulatif	Jumlah pelayanan Administrasi Umum yang tersedia	12	12	350,000,000

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan	Program, Kegiatan & Subkegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan		
									Awal	2024	
									Target	Target	Rp
				Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	progres positif	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	3	3	
			21801208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	akumulatif	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	2	1,965,000,000
			2180120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Laporan	akumulatif	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	12	12	250,000,000
			2180120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Laporan	akumulatif	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	39	39	1,715,000,000
			21801209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	akumulatif	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	336,000,000

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan	Program, Kegiatan & Subkegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan		
									Awal	2024	
									Target	Target	Rp
			2180120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan barang gedung milik daerah yang dilaksanakan	Unit	progres positif	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	11	11	110,000,000
			2180120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan barang gedung milik daerah yang dilaksanakan	Unit	progres positif	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	66	66	100,000,000
			2180120909	Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan barang gedung milik daerah yang dilaksanakan	Unit	progres positif	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	2	2	76,000,000
			2180120910	Pemeliharaan/R rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan barang gedung milik daerah yang dilaksanakan	Unit	progres positif	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	2	2	50,000,000

Indikator tujuan sebagaimana diatas akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Sedangkan indikator Sasaran dan indikator program sebagiannya akan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan atas usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan adalah usulan masyarakat melalui musrenbang tingkat desa, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten yaitu berupa skala prioritas dari tiap tahapan musrenbang. Untuk DPMPTSP tidak ada usulan program kegiatan melalui meknisme musrenbang dari masyarakat, tetapi masih memungkinkan dari pokir DPRD serta mengakomodir urusan OPD lain yaitu diantaranya terkait Pengarus Utamaan Gender, Kabupaten Layak Anak serta pelayanan untuk disabilitas. Program dan kegiatan yang mendukung hal tersebut yaitu :

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Yaitu untuk sarana berupa komponen listrik/penerangan dan peralatan rumah tangga ruang laktasi , bermain anak dan disabilitas

2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Yaitu untuk mendukung sarana berupa penyediaan Listrik, komunikasi dan air.

3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Yaitu untuk pemeliharaan sarana dan peralatan ruang laktasi, bermain anak, dan disabilitas

4. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Yaitu pelayanan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan tanpa membedakan gender baik untuk pengusaha/investor serta masyarakat. Layanan tersebut berupa perizinan dan non perizinan, survey kepuasan masyarakat (pengunjung), serta konsultasi dan pengaduan masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Kebijakan nasional akan menjadi dasar pijakan bagi pembangunan di daerah, sehingga dalam hal ini pembangunan di daerah tidak terlepas dari prioritas pembangunan di tingkat nasional. Dengan demikian pembangunan di daerah akan selaras dengan pembangunan nasional. Arah tujuan pembangunan nasional adalah dalam rangka terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan bermartabat, sehingga prioritas pembangunan di daerah akan mengikuti arah tujuan nasional yang dilengkapi dengan target dan standar yang ditetapkan secara nasional.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

Tujuan Penyusunan Renja OPD adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam UNDANG-UNDANG dalam 25 tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai berikut :

1. Guna memberikan arah pedoman bagi DPMPTSP dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam Tahun anggaran berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Agar perencanaan lebih berkesinambungan, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan memuaskan pihak-pihak yang harus dilayani.

Sedangkan sasaran Renja OPD adalah tercapainya target kinerja pada DPMPTSP melalui pelayanan yang prima dan aspiratif.

Sedangkan Tujuan OPD adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal;
2. Meningkatkan Investasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

Sasaran OPD adalah :

1. Mengoptimalkan sistem pelayanan penanaman modal
2. Meningkatnya Kegiatan Usaha yang Terealisasi Investasinya.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan strategi keijakan tujuan dan sasaran OPD tercantum pada Tabel :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

	Isu Strategis Kab. : 1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 2. Penanggulangan Kemiskinan
Tujuan Kab.	: 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Berdaya Saing 2. Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan SDM
Sasaran Kab.	: 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Kolaboratif 2. Meningkatkan kesempatan kerja
Prioritas Kab.	: 1. Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif 2. Peningkatan Investasi untuk menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan
	Permasalahan Urusan Penanaman Modal Kab. : 1. Ketepatan waktu penerbitan perizinan berusaha dan non berusaha yang belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan 2. Investasi yang ditawarkan belum menarik minat investor
Strategy Kab.	: 1. Strategy dan Arah Kebijakan Prioritas Peningkatan Tata Kelola Pemerinthan yang efektif dan kolaboratif : a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN melalui menyelenggarakan dan atau memfasiltasi keikutsertaan ASN dalam diklat dan bimtek, maupun melanjutkan Pendidikan b. Meningkatkan penerapan standar pelayanan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui peningkatan kualitas tata kelola TIK, peningkatan pemenuhan standar pelayanan, dan penerapan inovasi dalam tata Kelola pemerintahan c. Penerapan manajemen perubahan serta penataan kelembagaan dan proses bisnis organisasi melalui peningkatan kualitas pengawasan dan

<p>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan peningkatan kualitas perencanaan.</p> <p>2. Strategy dan arah kebijakan peningkatan investasi untuk menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan :</p> <p>a. Meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan memperbaiki iklim investasi untuk menarik investasi, pasar dan bisnis (pro growth)</p> <p>b. Meningkatkan laju investasi dan kualitas pelayanan perizinan melalui pemberian insentif investasi, kemudahan perizinan, peningkatan promosi, pengendalian pelaksanaan, dan pengembangan iklim investasi, pemenuhan infrastruktur penunjang investasi, peningkatan pelayanan perijinan serta penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi.</p>
<p>Isu Strategis OPD : 1. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal</p> <p>2. Peningkatan investasi daerah</p>

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal;	1. Mengoptimalkan sistem pelayanan penanaman modal	1. Melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan untuk peningkatan kinerja pelayanan public melalui pengembangan pelayanan perizinan dan non perizinan satu pintu.	1. Melakukan pengembangan pelayanan perizinan dan non perizinan satu pintu melalui peningkatan jenis sarpras layanan baik kualitas maupun kuantitasnya, peningkatan kapasitas SDM layanan serta peningkatan atas inovasi layanan
			2. Melakukan upaya	1. Melakukan

			peningkatan ketepatan waktu pelayanan perizinan melalui perbaikan mekanisme pelayanan perizinan	perbaikan mekanisme pelayanan perizinan melalui perbaikan atas standar operasional prosedur termasiuk dengan OPD mitra serta penerapan antrian secara online
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
2	Meningkatkan Investasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	1. Meningkatnya Kegiatan Usaha yang Terealisasi Investasinya	1. Melakukan upaya peningkatan realisasi investasi daerah untuk perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif, pemberian insentif dan atau kemudahan berusaha, peningkatan pemetaan potensi investasi, peningkatan kualitas promosi penanaman modal, serta peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal.	1. Melakukan pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif melalui penyelesaian investasi yang mangkrak, peningkatan pemberian insentif dan atau kemudahan berusaha melalui upaya jempit bola terhadap investasi yang memenuhi kriteria, peningkatan pemetaan potensi investasi melalui kajian-kajian serta

			<p>2. Melakukan upaya agar kegiatan usaha dapat direalisasikan investasinya melalui bantuan dalam penyelesaian atas kendala serta bantuan dalam pembuatan laporan realisasi investasi.</p>	<p>pemetaan lahan investasi, peningkatan kualitas promosi penanaman modal melalui diversifikasi kegiatan promosi serta peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha secara kontinyu</p> <p>2. Melakukan bantuan dalam penyelesaian atas kendala realisasi investasi serta bantuan dalam pembuatan laporan realisasi investasi melalui peningkatan aktifitas bantuan atas penyelesaian kendala dan laporan investasi kepada para pelaku usaha</p>
--	--	--	--	--

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
Misal: a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah, b. Peningkatan investasi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga akan mengurangi kemiskinan dan pengangguran, c. Pelayanan publik bidang perizinan yang cepat efektif dan memuaskan masyarakat
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: (a) Jumlah program dan jumlah kegiatan; (2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan; dan (3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
4. Pada sub bab ini disajikan matrik program dan kegiatan.

Program dan kegiatan mendasarkan atas perlunya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan pelayanan dan kesehatan masyarakat dan peningkatan pemerataan pendidikan sehingga perda yang disusun akan berpihak kepada masyarakat dan OPD akan berfungsi sebagai ujung tombak pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dalam rangka ikut mewujudkan visi misi bupati.

Atas dasar hal tersebut diatas maka penyusunan program dan kegiatan di DPMPTSP sudah selaras dengan faktor-faktor seperti tersebut diatas, yang pada prinsipnya adalah pelayanan di bidang penanaman modal dan PTSP.

DPMPTSP mempunyai 6 program dan 12 kegiatan serta 31 sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, berdasarkan SOTK baru.

Namun demikian ada perbedaan dengan rancangan awal Renja OPD dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan melalui mekanisme pembahasan KUA PPAS dengan TAPD Kab. Banyumas. Sehingga dalam hal ini diperoleh hasil akhir sesuai hasil analisis dengan memperhitungkan pada tercapainya sasaran target dan kemampuan keuangan daerah. Tabel mengenai hal tersebut diatas dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.315.252.000,00		
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			8.315.252.000,00		
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.408.252.000,00		
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.000.000,00		
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - <i>Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja</i>	(DPMPPTSP Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)	3 Dokumen	5.000.000,00 5.000.000,00	Disetujui	
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - <i>Dokumen Evaluasi Kinerja</i>	(DPMPPTSP Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)	3 Dokumen	5.000.000,00 5.000.000,00	Disetujui	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.065.000.000,00		
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - <i>Gaji dan Tunjangan ASN</i>	(DPMPPTSP Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)	31 Orang / Bulan	4.000.000.000,00 4.000.000.000,00	Disetujui	
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - <i>Honor PPTK dll</i>	(DPMPPTSP Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)	12 Orang	65.000.000,00 65.000.000,00	Disetujui	
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			848.252.000,00		
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - <i>Komponen Instalasi Listrik</i>	(DPMPPTSP Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)	15 Jenis	8.000.000,00 8.000.000,00	Disetujui	
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			50.252.000,00		

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI	CATATAN
		- <i>Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>(DPMPPTSP Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)</i>	<i>4 Jenis</i>	<i>50.252.000,00</i>	<i>Disetujui</i>	
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - <i>Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>(027/038/SPK/PPK-DPMPPTSP/III/2023, KAB. BANYUMAS)</i>	<i>20 Jenis</i>	15.000.000,00 <i>15.000.000,00</i>	<i>Disetujui</i>	
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - <i>Bahan Logistik Kantor</i>	<i>(027/038/SPK/PPK-DPMPPTSP/III/2023, KAB. BANYUMAS)</i>	<i>12 Bulan</i>	350.000.000,00 <i>350.000.000,00</i>	<i>Disetujui</i>	
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - <i>Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>(DPMPPTSP Kabupaten Banyuma, KAB. BANYUMAS)</i>	<i>20000 Buah</i>	50.000.000,00 <i>50.000.000,00</i>	<i>Disetujui</i>	
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - <i>Rapat Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas</i>	<i>(DPMPPTSP Kabupaten Banyuma, KAB. BANYUMAS)</i>	<i>200 Kali</i>	350.000.000,00 <i>350.000.000,00</i>	<i>Disetujui</i>	
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - <i>Asip Dinamis pada SKPD</i>	<i>(DPMPPTSP Kabupaten Banyuma, KAB. BANYUMAS)</i>	<i>2400 Berkas</i>	25.000.000,00 <i>25.000.000,00</i>	<i>Disetujui</i>	
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			184.000.000,00		
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - <i>Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>(DPMPPTSP Kabupaten Banyuma, KAB. BANYUMAS)</i>	<i>20 Unit</i>	109.000.000,00 <i>109.000.000,00</i>	<i>Disetujui</i>	
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - <i>Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>(DPMPPTSP Kabupaten Banyuma, KAB. BANYUMAS)</i>	<i>3 Unit</i>	75.000.000,00 <i>75.000.000,00</i>	<i>Disetujui</i>	
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.965.000.000,00		
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - <i>Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>(DPMPPTSP Kabupaten Banyuma, KAB. BANYUMAS)</i>	<i>12 Bulan</i>	250.000.000,00 <i>250.000.000,00</i>	<i>Disetujui</i>	

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI	CATATAN
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - <i>Jasa pelayanan umum kantor</i>	(DPMPTSP Kabupaten Banyuma, KAB. BANYUMAS)	39 Orang	1.715.000.000,00 1.715.000.000,00	Disetujui	
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			336.000.000,00		
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - <i>Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan</i>	(DPMPTSP Kabupaten Banyuma, KAB. BANYUMAS)	11 Unit	110.000.000,00	Disetujui	
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - <i>Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>	(DPMPTSP Kabupaten Banyuma, KAB. BANYUMAS)	66 Unit	100.000.000,00	Disetujui	
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - <i>Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	(DPMPTSP Kabupaten Banyuma, KAB. BANYUMAS)	2 Unit	76.000.000,00	Disetujui	
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - <i>Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	(DPMPTSP Kabupaten Banyuma, KAB. BANYUMAS)	2 Unit	50.000.000,00	Disetujui	
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			112.500.000,00		
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			7.500.000,00		
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota - <i>kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah</i>	(Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)	2 Kegiatan Usaha	7.500.000,00	Disetujui	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			105.000.000,00		
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota - <i>Peraturan daerah perda rencana umum penanaman modal daerah kabupaten kota</i>	(Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)	1 Dokumen	65.000.000,00	Disetujui	
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			40.000.000,00		

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI	CATATAN
		- <i>Dokumen Peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten kota</i>	<i>(Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)</i>	1 <i>Dokumen</i>	40.000.000,00	<i>Disetujui</i>	
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			157.000.000,00		
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			157.000.000,00		
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota - <i>Laporan Kegiatan Promosi Penanaman Modal</i>	<i>(DPMPTSP Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)</i>	2 <i>Dokumen</i>	97.000.000,00	<i>Disetujui</i>	
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota - <i>Peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan kabupaten kota (Naskah Perbup Strategi Promosi)</i>	<i>(DPMPTSP Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)</i>	1 <i>Dokumen</i>	60.000.000,00	<i>Disetujui</i>	
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			224.500.000,00		
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			224.500.000,00		
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah - <i>Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas insentif daerah</i>	<i>(Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)</i>	2 <i>Kegiatan Usaha</i>	20.000.000,00	<i>Disetujui</i>	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik - <i>pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik</i>	<i>(Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)</i>	10000 <i>Pelaku Usaha</i>	132.000.000,00	<i>Disetujui</i>	
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko - <i>Orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan</i>	<i>(Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)</i>	200 <i>Orang</i>	20.000.000,00	<i>Disetujui</i>	
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko - <i>Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan</i>	<i>(Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)</i>	24 <i>Kegiatan Usaha</i>	52.500.000,00	<i>Disetujui</i>	
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN			393.000.000,00		

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI	CATATAN
		PENANAMAN MODAL					
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			393.000.000,00		
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya - <i>Penyelesaian masalah investasi dan pengaduan</i>	<i>(DPMPTSP Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)</i>	<i>8 Pelaku Usaha</i>	50.000.000,00 <i>50.000.000,00</i>	<i>Disetujui</i>	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha - <i>Pelaku usaha dan kegiatan usaha yang memperoleh fasilitasi penyelesaian masalah pembinaan dan pengawasan</i>	<i>(Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)</i>	<i>262 Pelaku Usaha</i>	288.000.000,00 <i>288.000.000,00</i>	<i>Disetujui</i>	
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal - <i>kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan</i>	<i>(Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)</i>	<i>19 Kegiatan Usaha</i>	55.000.000,00 <i>55.000.000,00</i>	<i>Disetujui</i>	
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			20.000.000,00		
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000,00		
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik - <i>Data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah dikaji dan dimanfaatkan</i>	<i>(DPMPTSP Kabupaten Banyumas, KAB. BANYUMAS)</i>	<i>4 Dokumen</i>	20.000.000,00 <i>20.000.000,00</i>	<i>Disetujui</i>	
		JUMLAH			8.315.252.000,00		

Rumusan Rencana Program dan kegiatan seperti tersebut diatas, selaras dengan Renstra OPD tahun 2024-2026 Peralihan. Sedangkan perkiraan untuk tahun 2024 menggunakan asumsi berdasarkan anggaran tahun 2023 serta Rancangan Renstra OPD 2024-2026 Peralihan, meskipun ada beberapa subkeg yang telah dimutakhirkan serta adanya perubahan indicator tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Namun demikian perkiraan ini dapat berubah melihat kemampuan keuangan daerah, perkembangan prioritas sasaran serta perkiraan realisasi tahun 2023. Pada Tahun 2024 Renja terindikasi sejumlah Rp 8.315.252.000,- dari rencana awal Renstra Rp 12.868.778.000,-. Hasil ini dari arahan / pagu yang diberikan oleh Bappedalitbang/TAPD Kab. Banyumas. Anggaran akhir masih menunggu ditetapkannya KUA PPAS oleh TAPD, dikarenakan dimungkinkan adanya pokir dari DPRD Kab. Banyumas dan DAK Non Fisik dari Kementerian Investasi/BKPM. Sedangkan berdasarkan rapat dengan komisi 1 DPRD Kab. Banyumas akan diberikan prioritas anggaran pada Program Promosi Investasi dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan karena untuk menopang target investasi Kab. Banyumas yang cukup tinggi sehingga diperlukan adanya anggaran promosi serta kepada pelayanan perizinan sebagai garda terdepan pelayanan publik di sektor penanaman modal.

Ada beberapa hal yang telah terakomodir dalam Usulan Renja Tahun 2024 karena telah dibatasi dengan pagu Renstra untuk masing-masing OPD, hal ini merupakan kebijakan anggaran yang dilakukan oleh Pemertintah Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB IV. PENUTUP

Sebagai dokumen perencanaan, Renja OPD dijadikan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan periode anggaran. Dengan evaluasi tersebut dapat ditentukan strategi untuk pengembangan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Banyumas dimasa yang akan datang.

Renja OPD akan sangat berkaitan dengan anggaran yang dibutuhkan, apabila anggaran tidak tersedia secara maksimal maka perlu analisa lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran, sehingga target kinerja dan standar pelayanan yang ditetapkan dicapai. Analisa yang dibutuhkan terhadap Renja adalah program-program dan aktifitas yang akan mendukung terwujudnya tujuan dari pembangunan daerah, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang baik dan dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Renja Tahun 2024 mengacu pada RPD Pemerintah Kabupaten Banyumas serta Rancangan Awal Renstra Peralihan DPMPTSP 2024-2026. Dimana ini merupakan periode baru setelah berakhirnya periode RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023 dan RPJMD Perubahan Kabupaten Banyumas 2021-2023, serta Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2023 dan Renstra DPMPTSP Perubahan Tahun 2021-2023.

Dengan renja ini akan menjadi acuan bagi terlaksananya tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, dengan harapan akan mencapai target kinerja penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah ditetapkan.

Purwokerto, 28 September 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas



IRAWATI, S.E.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650126 199003 2 005